



POPULISM:
JOURNAL OF ISLAMIC POLITICAL STUDIES

POPULISM, LEGITIMACY, and the Future of Democracy in the 21st Century

Sakralisasi Tradisi Kebatinan Wetu Telu:
Mengokohkan Eksklusivitas Tasawuf Lokal Suku Sasak

Muhammad Nasir

The Influence of the Millennial Generation on Political Developments
in Indonesia

Askana Fikriana, Hendri K

Islam dan Demokrasi: Pergulatan Pemikiran Politik dari Qutb hingga Huwaidi
Marzuki Manurung, Nazwa Nadia, Hidayatul Munawwarah, Rizky Maulana
Media Sosial dan Transformasi Komunikasi Politik

Umar Yadi Idris

The Influence of Source Credibility and Argument Quality of 'Jovi Adhiguna' on
Purchase Intention of Luxury Bags on Hermesien Closet's Instagram Account
Through Information

Root Rossinta Schumann, Bambang Dwi Prasetyo, Ananda Sabil Hussein
Reformasi Administrasi dan Desentralisasi pada Masa Dinasti Umayyah di
Damaskus (670–750 M)

Muhammad Ibrahim Rantau, Heru Permana Putra

Tantangan dan Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik:
Studi Kualitatif di Desa Salut

Adib Zata Ilmam, Lalu Moh Nazar Fajri, Nurul Jannah

VOLUME 7. NO 2 2025



PROGRAM STUDI
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM



Populism, Legitimacy, and the Future
of Democracy in the 21st Century

Volume 8 Nomor 2
Tahun 2025



POPULISM:
JOURNAL OF ISLAMIC POLITICAL STUDIES

POPULISM, LEGITIMACY, and the Future of Democracy in the 21st Century

Volume 8 Nomor 2 Politea menghadirkan diskursus kritis mengenai populisme, legitimasi, dan masa depan demokrasi pada abad ke-21. Edisi ini menghimpun tujuh artikel yang mengeksplorasi dinamika sosial-politik kontemporer melalui pendekatan historis, filosofis, hingga analisis komunikasi politik modern. Dimulai dari pembacaan mendalam atas tradisi kebatinan Wetu Telu sebagai ekspresi tasawuf lokal Sasak, edisi ini bergerak menuju kajian tentang peran generasi milenial dalam perubahan politik Indonesia. Berlanjut pada pergulatan panjang antara Islam dan demokrasi melalui telaah pemikiran Qutb hingga Huwaidi, serta transformasi komunikasi politik di era media sosial. Isu-isu mutakhir lain seperti pengaruh kredibilitas figur publik dalam perilaku konsumsi digital, reformasi administrasi pemerintahan sejak masa Dinasti Umayyah, dan tantangan kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik turut memperkaya keberagaman perspektif akademik di dalamnya. Edisi ini tidak hanya memperluas cakrawala pembaca mengenai problematika politik dan pemerintahan, tetapi juga menawarkan refleksi konseptual dan empiris yang relevan bagi pengembangan studi politik kontemporer, khususnya dalam memahami dinamika demokrasi dan masyarakat modern.

VOLUME 8. NO 2 2025



PROGRAM STUDI
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

POPULISM:
JOURNAL OF ISLAMIC POLITICAL STUDIES

POPULISM, LEGITIMACY,



and the Future of Democracy in the 21st Century

Sakralisasi Tradisi Kebatinan Wetu Telu:
Mengokohkan Eksklusivitas Tasawuf Lokal Suku Sasak
Muhammad Nasir

The Influence of the Millennial Generation on Political Developments
in Indonesia

Askana Fikriana, Hendri K
Islam dan Demokrasi: Pergulatan Pemikiran Politik dari Qutb hingga Huwaidi
Marzuki Manurung, Nazwa Nadia, Hidayatul Munawwarah, Rizky Maulana
Media Sosial dan Transformasi Komunikasi Politik

Umar Yadi Idris
The Influence of Source Credibility and Argument Quality of 'Jovi Adhiguna' on
Purchase Intention of Luxury Bags on Hermesien Closet's Instagram Account
Through Information

Root Rossinta Schumann, Bambang Dwi Prasetyo, Ananda Sabil Hussein
Reformasi Administrasi dan Desentralisasi pada Masa Dinasti Umayyah di
Damaskus (670-750 M)

Muhammad Ibrahim Rantau, Heru Permana Putra
Tantangan dan Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik:
Studi Kualitatif di Desa Salut
Adib Zata Ilmam, Lalu Moh Nazar Fajri, Nurul Jannah

VOLUME 7. NO 2 2025



PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* kembali menerbitkan Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025 dengan tema besar **“Populism, Legitimacy, and the Future of Democracy in the 21st Century.”** Tema ini dipilih sebagai respons atas dinamika global yang terus menunjukkan gejala populisme, menantang fondasi legitimasi politik, serta memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru mengenai arah perjalanan demokrasi kontemporer.

Edisi ini menghadirkan tujuh artikel yang tidak hanya menawarkan keluasan perspektif, tetapi juga kedalaman analisis. Kajian mengenai sakralisasi tradisi kebatinan Wetu Telu membuka diskursus tentang keberlanjutan identitas kultural dan spiritual masyarakat Sasak. Kontribusi mengenai generasi milenial dan politik Indonesia memberikan gambaran tentang bagaimana konfigurasi partisipasi politik mengalami transformasi signifikan. Pembahasan relasi Islam dan demokrasi menegaskan kembali pentingnya dialog intelektual yang terbuka, kritis, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, artikel tentang media sosial dan komunikasi politik menyoroti pergeseran lanskap ruang publik, sementara kajian mengenai kredibilitas figur publik di ranah digital memberikan perspektif baru terkait perilaku konsumsi dalam masyarakat informasi. Dua artikel terakhir tentang reformasi administrasi era Umayyah serta tantangan kinerja aparatur desa

memperkaya edisi ini melalui tawaran refleksi historis dan analisis kebijakan publik yang relevan bagi kebutuhan akademik dan praksis pemerintahan di Indonesia.

Kami berharap bahwa keseluruhan artikel dalam edisi ini dapat memperluas cakrawala keilmuan, memperkuat tradisi riset politik Islam, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan wacana akademik di tingkat nasional maupun global. *Politea* berkomitmen untuk terus menjaga kualitas publikasi melalui proses editorial yang ketat, objektif, dan berintegritas.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis, mitra bestari, dewan redaksi, serta seluruh pihak yang berperan dalam penerbitan edisi ini. Semoga kerja kolaboratif ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam meneguhkan peran ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan publik.

Mataram, Agustus 2025

Agus Dedi Putrawan, M.S.I.

Editor in Chief – Journal Politea, UIN Mataram

DAFTAR ISI

Sakralisasi Tradisi Kebatinan Wetu Telu: Mengokohkan Eksklusivitas Tasawuf Lokal Suku Sasak	
<i>Mubammad Nasir</i>	
	1–13
The Influence of the Millennial Generation on Political Developments in Indonesia	
<i>Askana Fikriana, Hendri K</i>	
	14–24
Islam dan Demokrasi: Pergulatan Pemikiran Politik dari Qutb hingga Huwaidi	
<i>Marzuki Manurung, Nazwa Nadia, Hidayatul Munamwarah, Rizky Maulana</i>	
	25–48
Media Sosial dan Transformasi Komunikasi Politik	
<i>Umar Yadi Idris</i>	
	49–71
The Influence of Source Credibility and Argument Quality of 'Jovi Adhiguna' on Purchase Intention of Luxury Bags on Hermesien Closet's Instagram Account Through Information	
<i>Root Rossinta Schumann, Bambang Dwi Prasetyo, Ananda Sabil Hussein</i>	
	72–90
Reformasi Administrasi dan Desentralisasi pada Masa Dinasti Umayyah di Damaskus (670–750 M)	
<i>Muhammad Ibrahim Rantau, Heru Permana Putra</i>	
	91–109
Tantangan dan Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik: Studi Kualitatif di Desa Salut	
<i>Adib Zata Ilmam, Lalu Moh Nazar Fajri, Nurul Jannah</i>	
	110–124



**KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Kampus I :Jl. Pendidikan No. 35 Telp. (0370) 621298, 625337, 634490 (Fax. 625337) Mataram Kampus II :Jl.
GajahMada, Jempong Baru Telp. (0370) 620783 (Fax. 62784) Mataram

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

Nomor: 02 /Un.12/FUSA/PP.00.9/01/2024

Tentang

**PENETAPAN TIM PENGELOLA JURNAL POLITEA PRODI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN MATARAM**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN MATARAM

Menimbang`

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program penerbitan jurnal Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram dipandang perlu menetapkan tim pengelola Jurnal Politea (Politea: Journal of Islamic Political Studies);
- b. Bahwa tim pengelola Jurnal Politea: Journal of Islamic Political Studies Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram dipandang cakap dan memenuhi syarat teknis akademis dan administrasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;
- c. Bahwa tim pengelola Jurnal Politea: Journal of Islamic Political Studies Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram.

Mengingat

- : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Mataram;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Mataram
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG TIM PENELOLA JURNAL POLITEA: JOURNAL OF ISLAMIC POLITICAL STUDIES PRODI PEMIKIRAN POLITIK SILAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN MATARAM.**

KESATU

- : Surat Keputusan Rektor UIN Mataram Tentang Penetapan tim pengelola Jurnal Politea: Journal of Islamic Political Studies Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA UIN Mataram;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Mataram Pada
Tanggal : 4 Januari 2024

An. Rektor
Dekan,



Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd
NIP. 196602151997031001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UIN Mataram
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor UIN Mataram
Nomor : **02/Un.12/FUSA/PP.00.9/01/2024**
Tanggal : 4 Januari 2024
Tentang : Tim pengelola Jurnal Politea: Journal of Islamic Political Studies Prodi Pemikiran Politik
Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram.

Penanggungjawab : Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd
Ketua Penyunting/Redaktur : Agus Dedi Putrawan, M.S.I

Mitra Bestari :

1. Dr. Zoltan Pall (Utrecht University)
2. Mowafg Masuwd (University of Zawia, Libya)
3. Dr. Adibah Binti Sulaiman (Universty Sains Islam Malaysia)
4. Abdul Razak Abdulraya (Walaiklak University, Thailand)
5. Wahyudi Akmaliah (PMB-BRIN, Nation University of Singapore)
6. Ahmad Ali Nurdin, Ph.D. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
7. Dr. Nurhidayat Sardini, S.Sos., M.Si. (UNDIP)
8. Dr. Hilmy Faizi, M. Hum. (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)
9. Dr. Kismartini, M.Si. (Universitas Diponegoro Semarang)
10. Dr. Muhammad Ansor, MA. (IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)
11. Muhtar Haboddin, S.IP., M.A. (Universitas Brawijaya Malang)
12. Muhammad Alkaf, S. Sos., M.S.I. (IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)
13. Muhammad Said, M.Hum (STAI Darul Kamal)
14. Kiki Mikail, MA (UIN Raden Fatah Palembang)
15. Lalu Ariadi, MA (IAIH NW Pancor)
16. Haris Rosidi, M.Pd (STIT Palapa)

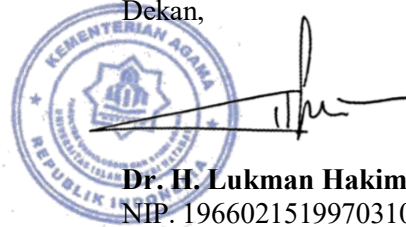
Dewan Penyunting :

1. Saripoden Moctar (Mindanao State University, Pilipina)
2. Panji Tanashur (The Australian National University, Australia)
3. Sar'in (Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia)
4. Ricky Muharam (Universitas Diponegoro)
5. Dr. Zuly Qodir, M.Ag. (UM Yogyakarta, APSIPOLIS Indonesia)
6. Lalu Wahyu Rizaldi, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)
7. Dr. Agus, M.Si. (UIN Mataram)
8. Dr. Ihsan Hamid, MA.Pol. (UIN Mataram)
9. Zakaria Ansori, M.Hum. (UIN Mataram)
10. Abdul Karim, S.S., M.Hum. (UIN Mataram)
11. Muh. Alwi Parhanudin, M.S.I. (UIN Mataram)
12. Muhammad Rizky HK., M.A. (UIN Mataram)
13. Ibnu Murtadho, M.Sos (UIN Mataram)
14. Saipul Arip Watoni, M.S.I (UIN Mataram)
15. Very Wahyudi, MA. (UIN Mataram)
16. Purnami Safitri, MA (UIN Mataram)
17. Iskandar Dinata (UIN Mataram)
18. Assazali Sibawaihi, M.HI (UIN Mataram)
19. Ishak Hariyanto, M.Hum (UIN Mataram)
20. Maliki, M.A (UIN Mataram)

Desain Grafis : Miptahul Khair
Kesekretariatan : Fitri Handayani, SE
Hardiana Nisa, S.E

An. Rektor

Dekan,

The image shows a circular official stamp of the Kementerian Agama (Ministry of Religion) of the Republic of Indonesia. The stamp features a central emblem with a mosque dome and crescent moon, surrounded by the text "KEMENTERIAN AGAMA" and "REPUBLIK INDONESIA". Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd
NIP. 196602151997031001

SACRILIZATION OF THE WETU TELU SPIRITUAL TRADITION: STRENGTHENING THE EXCLUSIVITY OF THE LOCAL SUFISM OF THE SASAK TRIBE

MUHAMMAD NASIR

STIT Al-Aziziyah Kapek Gunungsari
penasastra375@gmail.com

Abstract

Wetu Telu, with its distinctive spiritual characteristics, reflects the dialectic between Islam and local wisdom that forms unique religious practices in Sasak society. This article attempts to trace the process of sacralization that occurred in Wetu Telu and its contribution to maintaining the identity of local Sufism through a qualitative approach with phenomenological methods. Respondents included as many as 10 religious and community leaders in Kayangan District. The research results show that in the context of Wetu Telu sacralization, it functions to maintain the spiritual and mystic values that are the foundation of this tradition. The Wetu Telu Islamic Community is more exclusive, meaning that these teachings and beliefs are only spread among indigenous people and rarely touch immigrant communities because the spread of these teachings is taught in a hidden and very secret manner, thus distinguishing it from other Islamic teachings. This local exclusivity of Sufism gives the Sasak people a unique religious identity amidst the current modernisation and the influence of orthodox Islam, while preserving their cultural heritage and spiritual values. So this research concludes that adherents of Wetu Telu Islamic teachings focus more on forging themselves internally, which is carried out with religious rites that lead to inner teachings, which are the core of this teaching.

Keywords: local sufism; mysticism; sacralization; sasak tribe; wetu telu



A. Introduction

Tradisi kebatinan merupakan salah satu tradisi yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Tradisi ini mengakar kuat dalam diri masyarakat karena dilakoni dalam setiap aktivitas kehidupannya. Praktek-praktek sosial dan ritus-ritus keagamaan selalu disandingkan dengan hal-hal yang berbau magis, sakral alih-alih panteisme-esoterik. Secara filosofis, esoterik menekankan adanya pemahaman mendalam sebagai jati diri yang tidak ter-ekpost secara serampangan karena bersifat ‘eksklusif’ (rahasia)¹. Unsur “ke-rahasia-an” yang melekat pada ajaran esoterik cenderung menjadi momok menakutkan bagi orang yang belum mampu menerjemahkan “diksi-diksi sakral” dalam kitab suci sehingga terjebak pada penafsiran-penafsiran dangkal, mengarah pada pengkultusan teofani Tuhan. Kondisi ini terjadi karena adanya gesekan antara hal yang esensial dalam sebuah agama dengan kearifan lokal yang sudah menjadi jati diri suatu masyarakat tertentu, Sehingga sulit untuk dibedakan. Tradisi kebatinan dipratikkan oleh suku, etnis dan golongan-golongan tertentu yang ada di daerah Indonesia seperti; Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, dan lombok².

Lombok berada di Nusa tenggara Barat, merupakan daerah yang kaya dengan local wisdom yang “kantonginya”. Kearifan lokal yang mencuat di permukaan merupakan hasil intraksi sosial-budaya

¹ Antoine Faivre, *Access to Western Esotericism* (Albany, NY: State University of New York Press, 1994).

² Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960); M C Ricklefs, *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries* (Norwalk: EastBridge, 2006).



dengan agama tertentu. Salah satunya adalah ajaran Islam Wetu Telu yang ada di Kabupaten Lombok Utara lahir dari singkritisme budaya.

Judith Ecklund dalam tulisan yang berjudul “The Sasak of Lombok” secara apik menjelaskan:

Konsep sinkretisme dalam Islam Wetu Telu mencerminkan penggabungan antara ajaran Islam dengan kepercayaan lokal masyarakat Sasak, yang masih mempraktikkan elemen-elemen Hindu-Buddha dan animisme yang telah ada sebelumnya. Islam Wetu Telu menyerap berbagai ritual dan kepercayaan leluhur, menunjukkan fleksibilitas budaya masyarakat Sasak dalam menerima agama baru sambil tetap mempertahankan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun³.

Sedangkan Suryani, menuturkan bahwa, Tradisi *Wetu Telu* merupakan bentuk praktik keagamaan yang berkembang di kalangan masyarakat Sasak, Lombok. Praktik ini memadukan elemen-elemen ajaran Islam dengan nilai-nilai dan kepercayaan lokal, yang menghasilkan bentuk keberagaman dengan fokus pada mistisisme lokal atau tasawuf. Istilah *Wetu Telu* yang berarti "tiga waktu" merujuk pada pelaksanaan ibadah shalat tiga kali sehari, berbeda dengan lima waktu yang lazim dalam ajaran Islam ortodoks. Hal ini menunjukkan adaptasi Islam terhadap budaya lokal yang unik, serta keberagaman spiritualitas Islam di Nusantara⁴. Ajaran wetu telu di bangun di atas perpaduan antara kearifan lokal dan ajaran islam sehingga bisa dikatakan bersifat eksklusif. Karena ciri khas dari

³ Judith Ecklund, *The Sasak of Lombok* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1977).

⁴ Suryani, *Wetu Telu: Antara Ajaran Islam Dan Tradisi Sasak Di Lombok* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).



ajaran wetu telu ini sangat tertutup dan sangat jarang terjamah oleh pihak luar sehingga hanya di konsumsi oleh kalangan tertentu (kalangan orang-orang yang mendiami daerah kabupaten lombok Utara)

B. Method

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah fenomenologi, yang dipilih secara khusus karena kemampuannya untuk menyelami secara mendalam realitas manusia dari perspektif subjek yang mengalaminya secara langsung. Sebagaimana ditegaskan oleh Patton, pendekatan fenomenologi sangat tepat diterapkan ketika permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan fenomena yang melibatkan pengalaman hidup seseorang yang bersifat alamiah dan melekat pada diri individu. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami esensi dari pengalaman tersebut tanpa terlepas dari konteksnya, mengingat pengalaman dianggap sebagai unsur fundamental yang tidak terpisahkan dan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk kehidupan seseorang.

Landasan filosofis dari pendekatan ini merujuk pada pemikiran Edmund Husserl, yang menyatakan bahwa hubungan antara manusia dan pengalamannya bersifat kontingen⁵, artinya pemahaman tentang realitas tidak dapat dipisahkan dari kesadaran dan interpretasi subjek terhadap dunianya. Dalam konteks ini, fenomenologi tidak hanya berfokus pada deskripsi fakta-fakta empiris belaka, tetapi lebih pada penelusuran lapisan-lapisan makna

⁵ Edmund Husserl, *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenological Philosophy*, trans. F Kersten (Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1983).



yang dikonstruksi oleh individu melalui pengalaman langsung mereka yang hidup. Hal ini menjadikan fenomenologi sebagai metode yang sangat tepat dan powerful untuk mengungkap kompleksitas pengalaman hidup, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai intrinsik, keyakinan, dinamika sosial, dan praktik-praktik kultural yang hanya dapat dipahami dari dalam.

Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari sepuluh orang yang dipilih secara purposif dengan kriteria yang spesifik, yaitu para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada dan aktif di wilayah Kecamatan Kayangan. Pemilihan kedua kelompok ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memegang peran yang sangat strategis dan sentral dalam komunitasnya; mereka bukan hanya menjadi bagian dari masyarakat, tetapi juga berperan sebagai pembentuk opini, penjaga nilai-nilai tradisi, penafsir norma keagamaan, dan penggerak praktik sosial di lingkungannya. Melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengalaman personal dan proses pemaknaan yang diutarakan oleh para responden ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang kaya, autentik, dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti, sehingga tetap menjaga prinsip kedalaman, kekayaan, dan kontekstualitas data sesuai dengan jiwa penelitian fenomenologis.

C. Result and Discussion

1. Sakralisasi Tradisi Wetu Telu

Sakralisasi merupakan proses yang mengangkat nilai atau praktik tertentu ke tingkat kesucian atau ketidakbiasaan, menciptakan jarak emosional dan spiritual antara hal tersebut



dengan unsur-unsur kehidupan sehari-hari⁶. Dalam konteks Wetu Telu, sakralisasi berfungsi untuk menjaga nilai-nilai spiritual dan kebatinan yang menjadi fondasi tradisi ini. Tradisi Wetu Telu memadukan unsur Islam dengan adat dan kepercayaan animisme lokal. Ritual-ritual dalam Wetu Telu seperti nyiu (ritual untuk leluhur) dan rowah (penghormatan roh leluhur) menjadi bentuk ekspresi yang menjaga keberadaan dan keaslian tradisi ini⁷.

Hasil observasi lebih lanjut yang dilakukan peneliti, untuk menguatkan ke-autentikan eksklusivitas pada penyebaran ajaran tasawuf lokal, para jama'ah dengan kesadarannya sendiri ketika mengkaji ajaran tasawuf lokal tidak pernah merekam atau melakukan kegiatan sejenisnya yang bisa mengancam eksklusivitas komunikasi yang sudah terjaga dalam penyebaran ajaran tasawuf lokal. Sebagaimana dijelaskan terdahulu, ajaran tasawuf lokal ini berasal dari para wali-wali yang datang ke pulau Lombok membawa ajaran Islam. Sebagian mempelajarinya dari beberapa guru sehingga mereka diberikan kitab-kitab yang notabene-nya bertuliskan Arab Melayu dan kemudian menyebarkannya.

Adapun tempat yang digunakan untuk melakukan penyebaran ajaran ini terpusat di dua tempat yaitu di “kampu” dan “masjid kuno”. Kampu merupakan tempat sakral bagi pengikut ajaran ini karena kampung merupakan tempat di mana semua kegiatan keagamaan dan adat dilakukan. Setelah dari kampu kemudian akan dilanjutkan di masjid. Masjid Kuno Bayan, sebagai

⁶ Mircea Eliade, *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1957).

⁷ John R Bowen, *Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society* (New York: Princeton University Press, 2003).



pusat ritual utama, berperan penting dalam sakralisasi Wetu Telu, berfungsi sebagai tempat di mana dimensi spiritualitas dan esoterisme Wetu Telu dipelihara. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai tempat suci yang melambangkan keberadaan para leluhur. Sakralisasi ini membentuk ikatan emosional yang kuat antara masyarakat Sasak dengan nilai-nilai kebatinan mereka, yang menjadikan tradisi Wetu Telu sebagai manifestasi dari identitas spiritual yang eksklusif⁸.

2. Eksklusivitas Tasawuf Lokal dalam Wetu Telu

Komunitas Islam Wetu Telu lebih bersifat eksklusif—dalam artian, bahwa ajaran dan kepercayaan ini hanya tersebar bagi orang-orang pribumi (masyarakat lokal) dan jarang menyentuh masyarakat pendatang karena penyebaran ajaran ini diajarkan secara tersembunyi dan sangat rahasia, sehingga membedakannya dari ajaran Islam lainnya. Wetu Telu mengedepankan tasawuf atau kebatinan yang membedakan praktiknya dari Islam ortodoks. Dalam tasawuf, esoterisme atau dimensi batin sangatlah penting karena berfokus pada hubungan langsung dan personal antara individu dengan Tuhan. Esoterisme ini hadir dalam Wetu Telu melalui konsep pencarian makna batin dan pengalaman spiritual yang mendalam. Sakralisasi ajaran ini membantu menciptakan eksklusivitas tasawuf lokal yang memperkuat ikatan komunitas Sasak dengan tradisi

⁸ Julia Day Howell, "Sufism and the Indonesian Islamic Revival," *The Journal of Asian Studies* 60, no. 3 (2001): 701–29; Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1992); Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu* (Jakarta: Gramedia, 2000).



mereka⁹. Proses sakralisasi ini pada akhirnya membentuk identitas tasawuf lokal yang bersifat unik karena tetap mempertahankan nilai-nilai lokal di dalam ajaran Islam, menjadikan Wetu Telu lebih dari sekadar praktik ritual, tetapi sebagai manifestasi dari pengalaman mistis dan kebatinan masyarakat Sasak.

Wetu Telu adalah ajaran yang menggabungkan aspek-aspek spiritualitas Islam dan tradisi lokal masyarakat Sasak di Lombok. Ajaran ini mengedepankan tiga tahapan penting dalam pencapaian spiritual, yaitu mikir (meditasi), ngaji (pembelajaran agama), dan nyombar (ibadah), yang secara keseluruhan berfungsi untuk memperdalam pemahaman tentang Tuhan dan eksistensi-Nya. Konsep ini menunjukkan perpaduan antara dimensi lahiriah dan batiniah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak, yang merupakan inti dari ajaran Wetu Telu yang kaya dengan kearifan lokal dan ajaran Islam¹⁰.

3. Kebatinan sebagai Pilar Identitas Spiritual Suku Sasak

Peran kebatinan dalam Wetu Telu adalah menjaga kesinambungan nilai-nilai spiritual di tengah perubahan sosial dan tekanan dari Islam ortodoks yang semakin meluas. Nilai-nilai kebatinan ini tampak dalam sikap penghormatan terhadap leluhur dan pentingnya tradisi spiritual sebagai jembatan menuju Tuhan. Sebagai bentuk tasawuf lokal, Wetu Telu memberikan ruang bagi masyarakat Sasak untuk menjalankan keislaman yang mencerminkan warisan nenek moyang mereka, tanpa kehilangan

⁹ Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy* (New York: State University of New York Press, 2007).

¹⁰ Suryani, *Wetu Telu: Antara Ajaran Islam Dan Tradisi Sasak Di Lombok*.



esensi spiritual Islam. Dalam hal ini, kebatinan berperan sebagai pilar utama yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, serta menciptakan identitas spiritual yang kokoh dan eksklusif¹¹.

Wetu Telu mengajarkan keseimbangan antara dimensi fisik dan spiritual dalam kehidupan. Ajaran ini menekankan pentingnya upaya untuk meraih pencerahan batin melalui ibadah, meditasi, serta pemahaman ajaran agama Islam dan kebatinan lokal. Praktik spiritual ini bertujuan untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan, baik secara intelektual maupun melalui pengalaman batin yang mendalam¹². Dengan demikian bisa dikatakan bahwa, atas dasar ini sebagian dari penganut ajaran ini lebih mengarah pada penempatan diri secara batin yang dilakukan dengan ritus-ritus keagamaan yang mengarah pada ajaran batiniah yang merupakan inti dari ajaran ini.

A. Conclusion

Proses sakralisasi dalam Wetu Telu memainkan peran yang sentral dan fundamental dalam memperkuat eksklusivitas tasawuf lokal masyarakat Sasak. Mekanisme ini bukan sekadar tradisi turun-temurun, melainkan suatu kerangka spiritual yang dengan sengaja dibangun dan dipelihara untuk menandai batas-batas keyakinan yang unik. Eksklusivitas ini kemudian membentuk suatu sistem

¹¹ M Taufiqurrahman, *Wetu Telu: Kearifan Lokal Sasak Di Tengah Globalisasi Islam* (Yogyakarta: LKis, 2008).

¹² Umanail, *Filosofi Wetu Telu Dalam Kehidupan Masyarakat Sasak: Menjaga Keseimbangan Dunia Dan Akhirat* (Mataram: Universitas Mataram Press, 2018); Hamzah, "Integrasi Islam Dan Kebatinan Dalam Tradisi {Wetu} {Telu}: Sebuah Pendekatan Spiritual," *Jurnal Tasawuf Indonesia* 15, no. 1 (2020): 94–106.



kepercayaan yang khas, yang membedakannya dari aliran Islam lainnya dan sekaligus menjadi fondasi kokoh bagi keberlangsungan identitas komunitas tersebut.

Sakralisasi tersebut secara nyata termanifestasi melalui berbagai ritual yang ketat dan tempat-tempat suci yang dipelihara, yang berfungsi sebagai pusat spiritual sekaligus simbol kebatinan masyarakat Sasak. Setiap ritual dan lokasi tersebut bukan hanya memiliki makna prosedural, tetapi merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai spiritual yang abstrak, sehingga menghubungkan komunitas dengan leluhur dan dimensi ketuhanan. Dengan teguh menjunjung tinggi nilai-nilai kebatinan ini, Wetu Telu secara jelas memperlihatkan bagaimana ajaran Islam dapat terintegrasi secara harmonis dengan tradisi lokal tanpa harus kehilangan kedalaman dan esensi spiritualnya.

Pada akhirnya, eksklusivitas tasawuf lokal ini memberikan masyarakat Sasak suatu identitas keagamaan yang unik dan tangguh di tengah gempuran arus modernisasi dan pengaruh Islam ortodoks yang semakin mengglobal. Keunikan ini tidak hanya menjadi tameng pelindung yang menjaga warisan kebudayaan serta nilai-nilai spiritual mereka dari tergerus zaman, tetapi juga menjadi penanda yang menegaskan otonomi dan keberadaan mereka dalam peta keberagaman Islam Nusantara yang luas.



B. References

- Arifi, M.A. (2019) 'Bowen, John R. *Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society*. New York: Princeton University Press, 2003.
- Bruinessen, Martin van. *Tarekat Naqsyabandiyah Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1992.
- Ecklund, Judith. *The Sasak of Lombok*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1977.
- Eliade, Mircea. *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1957.
- Faivre, Antoine. *Access to Western Esotericism*. Albany, NY: State University of New York Press, 1994.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
- Hamzah. "Integrasi Islam Dan Kebatinan Dalam Tradisi {Wetu} {Telu}: Sebuah Pendekatan Spiritual." *Jurnal Tasawuf Indonesia* 15, no. 1 (2020): 94–106.
- Howell, Julia Day. "Sufism and the Indonesian Islamic Revival." *The Journal of Asian Studies* 60, no. 3 (2001): 701–29.
- Husserl, Edmund. *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenological Philosophy*. Translated by F Kersten. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1983.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. New York: State University of New York Press, 2007.
- Ricklefs, M C. *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries*. Norwalk: EastBridge, 2006.
- Suryani. *Wetu Telu: Antara Ajaran Islam Dan Tradisi Sasak Di Lombok*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Taufiqurrahman, M. *Wetu Telu: Kearifan Lokal Sasak Di Tengah Globalisasi Islam*. Yogyakarta: LKis, 2008.
- Umanail. *Filosofi Wetu Telu Dalam Kehidupan Masyarakat Sasak: Menjaga Keseimbangan Dunia Dan Akhirat*. Mataram: Universitas Mataram Press, 2018.



- Bowen, John R. *Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society*. New York: Princeton University Press, 2003.
- Bruinessen, Martin van. *Tarekat Naqsyabandiyah Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1992.
- Ecklund, Judith. *The Sasak of Lombok*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1977.
- Eliade, Mircea. *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1957.
- Faivre, Antoine. *Access to Western Esotericism*. Albany, NY: State University of New York Press, 1994.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
- Hamzah. "Integrasi Islam Dan Kebatinan Dalam Tradisi {Wetu} {Telu}: Sebuah Pendekatan Spiritual." *Jurnal Tasawuf Indonesia* 15, no. 1 (2020): 94–106.
- Howell, Julia Day. "Sufism and the Indonesian Islamic Revival." *The Journal of Asian Studies* 60, no. 3 (2001): 701–29.
- Husserl, Edmund. *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenological Philosophy*. Translated by F Kersten. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1983.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. New York: State University of New York Press, 2007.
- Ricklefs, M C. *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries*. Norwalk: EastBridge, 2006.
- Suryani. *Wetu Telu: Antara Ajaran Islam Dan Tradisi Sasak Di Lombok*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Taufiqurrahman, M. *Wetu Telu: Kearifan Lokal Sasak Di Tengah Globalisasi Islam*. Yogyakarta: LKis, 2008.
- Umanail. *Filosofi Wetu Telu Dalam Kehidupan Masyarakat Sasak: Menjaga Keseimbangan Dunia Dan Akhirat*. Mataram: Universitas Mataram Press, 2018.
- Jurnal Studi Islam dan Filsafat*, 11(2), pp. 132–145.
- Bowen, J.R. (2003) *Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society*. New York: Princeton University Press.
- Ecklund, J. (1977) *The Sasak of Lombok*. New York: Holt, Rinehart and Winston.



- Eliade, M. (1957) *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Faivre, A. (1994) *Access to Western Esotericism*. New York: Albany: State University of New York Press.
- Hamzah (2020) 'Integrasi Islam dan Kebatinan dalam Tradisi Wetu Telu: Sebuah Pendekatan Spiritual', *Jurnal Tasawuf Indonesia*, 15(1), pp. 94–106.
- Husserl, E. (1983) *Ideas Pertaining to A Pure Phenomenological Philosophy*, Terj. F. Kersen. Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- Lombard, D. (2000) *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu*. Jakarta: Gramedia.
- Nasr, S.H. (2007) *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. New York: State University of New York Press.
- Suryani (2017) *Wetu Telu: Antara Ajaran Islam dan Tradisi Sasak di Lombok*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taufiqurrahman, M. (2008) *Wetu Telu: Kearifan Lokal Sasak di Tengah Globalisasi Islam*. Yogyakarta: LKis.
- Umanail (2018) *Filosofi Wetu Telu dalam Kehidupan Masyarakat Sasak: Menjaga Keseimbangan Dunia dan Akhirat*. Mataram: Universitas Mataram Press.



THE INFLUENCE OF THE MILLENNIAL GENERATION ON POLITICAL DEVELOPMENTS IN INDONESIA

ASKANA FIKRIANA

IAIN DATUK LAKSEMANA BENGKALIS

afikriana20@gmail.com

HENDRI. K

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

hendrika@uin-suska.ac.id

Abstract

The Millennial Generation is those born between 1981 and 1996. The high number of millennial voters has increased political movements in Indonesia, especially with the election of a millennial vice president. This is interesting to discuss in the formulation of the problem: 1) What political rights do the Millennial Generation have in Indonesia? 2) How does the Millennial Generation influence political developments in Indonesia? This study aims to determine the political rights of the Millennial Generation and their influence on political developments in Indonesia. The research method used is a descriptive analytical research method.

Based on this study, it is concluded that 11. The constitution is stated in the Law regarding the Political Rights of Citizens based on Article 43: (1) All citizens are entitled to the right to vote and to run for office in elections that are conducted directly, openly, freely, confidentially, honestly, and fairly, in line with the relevant legal regulations. 2) The millennial generation has a significant influence on political developments in Indonesia, as evidenced by the decline in abstention rates and the level of social media access that has made it easier for millennials to access election information and foster political literacy, according to a survey by the Indonesian Association of Indonesian Voters Associations (APIII) and data from the General Elections Commission (KPU).

Keywords: Political Rights, Millennial Generation, Golput.

A. Introduction

In today's era, the term "Millennial Generation" is often heard. Although many still don't understand what the millennial



generation means. The term initially emerged due to the increasingly rapid development of information technology. However, there is no definite time limit for the beginning and end of this group. Generation Y, or Millennials, were born between 1981 and 1996, this is the birth year range used by the Indonesian government, according to data from the Indonesian Central Statistics Agency (BPS) in the 2020 Population Census. Therefore, it can be estimated that the age range referred to as the millennial generation is 28–43 years.

Judging from the age range of the millennial generation, it can be concluded that they already have political rights. However, in Indonesia, there are still minimal opportunities given to millennials to exercise their political rights to the fullest. This undoubtedly impacts the role and desire of millennials to help advance public welfare and help Indonesia become a developed nation. Youth serve as agents of change who must persistently uphold and champion the foundational principles of the Indonesian state. They play a critical role in navigating and guiding the democratic transition toward a more progressive future, particularly by ensuring the realization of a just and fair political process. For a nation to advance, it requires youth of strong character and capability—making political literacy one of their essential responsibilities.¹

2024 is the year of the democratic celebration. Therefore, it is crucial and necessary for the millennial generation to be politically literate. This allows them to actively participate in determining the future of the Indonesian nation and state. However, what will be the impact if millennials are indifferent to politics in Indonesia? It will certainly have a significant impact on political developments in Indonesia. Nearly 69.38 million people are millennials, making up the second-most dominant population, accounting for 25.87%. These results were obtained from the Central Statistics Agency (BPS), which released statistical data revealing the composition of the Indonesian population by

¹ Yusrin and Salpina, 'Partisipasi Milenial Mengawasi Pemilu 2024', *Journal on Education*, 5.3 (2023), pp. 9646–53.



age group. This data is the result of the 2020 Population Census. This data provides a more in-depth explanation of the structure of Indonesia's future generations.

Based on the existing data, researchers are interested in conducting further research related to **"The Influence of the Millennial Generation on Political Developments in Indonesia"**.

From this presentation, several issues emerged, namely: What political rights do Millennials in Indonesia have? How does the Millennial Generation influence political developments in Indonesia?

B. Method

The research method used in this study is descriptive analytical research. This legal research approach utilizes a conceptual approach, an analytical approach to secondary data. Secondary data is data obtained indirectly through library research. This secondary data is divided into primary, secondary, and tertiary materials, which are analyzed descriptively and qualitatively.

C. Result and Discussion

A. Political Rights of the Millennial Generation in Indonesia

Political rights are rights that every person has, which are granted by law, to achieve and seize power, position and wealth that are useful for him.² These political rights are granted to all citizens who have fulfilled the requirements to have political rights. The constitutional guarantee of citizens' political rights is explicitly affirmed in the Law on Human Rights, particularly in Article 43, Paragraph (1). This article declares that every citizen has the right to vote and to be elected in general elections,

² Adrianus Bawamenewi, 'Implementasi Hak Politik Warga Negara', *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13.3 (2019), p. 43.



conducted on the basis of equal rights, and carried out in a manner that is direct, general, free, confidential, honest, and fair, in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.³ It's undeniable that millennials also possess political rights. These political rights are exercised through general elections (Pemilu). Elections are a means for citizens to exercise their political rights, including being elected, joining political organizations, and directly participating in election campaign activities.⁴

General elections in the Pancasila democracy system are a representation of the basic values of the nation and state by upholding honesty, freedom and confidentiality. These three principles are the standards and principles for implementing elections, where everyone can express their political ideas without coercion or intervention from any party.⁵

Political participation in elections is then regulated through Law No. 10 of 2016, Article 56 paragraph (1) which determines that citizens who have the right to channel their political aspirations are citizens who are 17 years old or have been married. The distribution of citizens' political rights in the election system based on equal standing in the law is directly proportional to the process of conveying the right to express opinions, express themselves, be elected and choose leaders, the freedom of which is guaranteed by the state through the implementation of the principle of holding independent general elections, without any manipulation, the principle of holding these elections is based on Law No. 7 of 2017 concerning general elections, Article 1 paragraph 1 which explains that general elections are a means of expressing the sovereignty of the people, therefore the election system for state administrators is a vehicle for obtaining the mandate of the people's power to regulate the administration of the state.

³ Ibid.,

⁴ Ibid.,

⁵ Chaerul Shaleh, 'Hak Politik Warga Negara Dan Pemilu', *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, 1.1 (2023), pp. 17–26.



From the explanation above, general elections are one of the rights that millennials can exercise their voices. Citizens' political rights can be implemented in several ways, as follows:

1. Right to Vote and Run for Office

Every citizen has the right to participate in elections by voting and standing as a candidate.

2. Right to Engage in Government Affairs

Citizens are entitled to take part in the functioning and decision-making processes of government.

3. Right to Freedom of Expression

Individuals have the right to express their opinions freely, including on matters of public and political interest.

4. Right to Hold Public Office

Citizens have the opportunity to be appointed to positions within the government based on fair selection processes.

5. Right to Form or Join Political Parties

Everyone has the right to establish, join, or support political parties and similar organizations in accordance with the law.

6. Right to Peaceful Assembly and Association

Citizens may gather peacefully and form associations or groups to pursue common political or social interests.

7. Right to Share Political Thoughts and Ideas

Every individual has the freedom to communicate and advocate for political beliefs and viewpoints.

The various implementations of political rights held by citizens, particularly millennials, certainly have an impact on political developments in Indonesia. Further research is needed to determine how the millennial generation influences political development in Indonesia.



B. The Influence of the Millennial Generation on Political Developments in Indonesia

The political rights inherent in the millennial generation certainly influence political developments in Indonesia. Why is this so? Indonesian politics in 2024 is considered a celebration of democracy because it will host general elections. Both the presidential and regional elections will be held in the same year, resulting in vibrant political growth and development in Indonesia.

As time goes by and technology advances rapidly, it also plays a significant role in political developments in Indonesia. This is evident in the numerous social media platforms that serve as platforms for citizens to learn about the potential leaders who will govern Indonesia in the future. Based on a survey conducted by the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII), generation Z and millennials have different social media preferences.⁶

The majority (51.9%) of Indonesian Generation Z frequently access the social media app Instagram. Meanwhile, among millennials, the majority (74.09%) frequently access Facebook.

⁶ Diakses dari, [https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/09/24/media-sosial-favorit-gen-z-dan-milenial-indonesia#:~:text=Menurut%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa,09%25\)%20sering%20mengakses%20Facebook.](https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/09/24/media-sosial-favorit-gen-z-dan-milenial-indonesia#:~:text=Menurut%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa,09%25)%20sering%20mengakses%20Facebook.), pada 30 Oktober 2024.





Figure 4.1 Results of the 2024 APJII Social Media Usage Survey

The data above is the result of a survey conducted by APJII from December 2023 to January 2024, involving a total of 8,720 respondents selected randomly and proportionally from 38 provinces in Indonesia.

From the survey results above, it can be seen that the millennial generation also plays an active role in using social media both as entertainment media and information media to find out information that is currently popular or trending.

This makes information regarding presidential and vice-presidential candidates very easy to find and obtain. As technology advances, millennials are increasingly interested in political movements in Indonesia.

This politically literate attitude is certainly the starting point for changes in political developments in Indonesia and can reduce the number of non-voters during the election process. This is evidenced by the statement made by the General Elections Commission (KPU) regarding the 2024 election.

The General Elections Commission (KPU) stated that 203 million people were registered as voters in the 2024 simultaneous

regional elections. Of these 203 million voters, 25.69% were in the Generation Z or Gen Z age category and 33% were Millennials.⁷

This was conveyed by the Chairman of the Indonesian General Elections Commission (KPU RI), Mochammad Afifuddin, in a press conference at the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs Office in Central Jakarta on Monday (November 25, 2024). He said that of the 203 million registered voters, the number of female voters outnumbered male voters.

*"Based on the national permanent voter list, 203,657,354 voters will exercise their right to vote, with a composition of 101,654,993 or 49.91 percent men and 102,111,361 or 50.9 percent women," said Afifuddin.*⁸

"Based on the final voter list (DPT), there are 52,318,841, or 25.69%, Gen Z voters, and 67,731,281, or 33%, millennial voters. Then there are 55,069,832, or 27.04%, Gen X voters, 25,799,756, or 12.67%, baby boomers, and 2,737,644, or 1.34%, pre-boomers," he explained.

Based on the official vote recapitulation conducted by the General Elections Commission (KPU), voter turnout in the 2024 presidential election reached 81.78 percent. This percentage was obtained from 164.3 million valid votes out of a total of 204.4 million registered voters.

Voter participation in the 2019 presidential election, which pitted Joko Widodo-Ma'ruf Amin and Prabowo Subianto-Sandiaga Uno against each other, remains the highest in the last four presidential elections, at 81.97 percent.

Compared to the 2014 election, voter participation in 2019 was quite high, with a 12.4 percent increase. The 2014 election, the first contest between Jokowi and Prabowo, only attracted 69.9 percent of voters. In the 2009 election, voter participation reached 72.6 percent. However, this marked a 7.2 percent decrease from

⁷ Diakses dari, <https://news.detik.com/pilkada/d-7656333/data-jumlah-pemilih-pilkada-2024-berdasarkan-usia-gen-z-25-69-milenial-33>.

⁸ Ibid.,



the 79.8 percent in the first round of the 2004 election. A different pattern emerged in the legislative elections over the past four cycles. In the 2024 Legislative Election, the General Elections Commission (KPU) recorded 151.8 million valid votes, with a voter turnout of 81.42 percent. Similar to the presidential election, this result was slightly lower than the 81.69 percent turnout in the 2019 Legislative Election.

Thus, the 2019 Election can be considered to have the lowest abstention rate since 2004, bucking the upward trend in abstention rates since post-reform elections. The list is as follows:

1. Number of Abstainers in the 2004 Presidential Election: 20.2 percent
2. Number of Abstainers in the 2009 Presidential Election: 27.4 percent
3. Number of Abstainers in the 2014 Presidential Election: 30.1 percent
4. Number of Abstainers in the 2019 Presidential Election: 18.03 percent
5. Number of Abstainers in the 2024 Presidential Election: 18.22 percent

At the time, KPU Chairman Hasyim Asy'ari acknowledged that voter participation in the 2024 Election had decreased compared to 2019. Compared to other countries that implemented a direct election system, voter participation rates untuk Pemilu 2024 di Indonesia, khususnya pilpres, masih tergolong tinggi. Penelitian dari *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA) menunjukkan bahwa dengan angka partisipasi Pemilu 2024, Indonesia termasuk dalam kategori partisipasi pemilih yang tinggi.

However, this study also states that the global trend of voter participation is expected to decline over the next decade due to voter apathy driven by rampant cases of corruption by government officials and indecisiveness in law enforcement. High rates of abstention from voting can seriously impact the legitimacy of elected governments. Ujang Komarudin, Executive Director of the Indonesia Political Review (IPR), stated that high



rates of abstention can diminish the legitimacy of the president, vice president, and elected legislative members. This has the potential to impact the stability and effectiveness of future governments.

The government has made efforts to reduce the abstention rate by involving religious leaders. The Chairman of the Indonesian Ulema Council (MUI) for Da'wah and Ukhuwah, M. Cholil Nafis, stated that abstention, or not voting in elections, is haram (forbidden). This fatwa was actually issued by the MUI since the 2009 elections and remains in effect this year.

D. Conclusion

From the explanation of the previous chapters, the following conclusions can be drawn regarding the research on the influence of the millennial generation on political developments in Indonesia:

1. The constitution is stated in the Law regarding the Political Rights of Citizens based on Article 43: (1) All citizens are entitled to the right to vote and to run for office in elections that are conducted directly, openly, freely, confidentially, honestly, and fairly, in line with the relevant legal regulations.
2. The millennial generation has a significant influence on political developments in Indonesia, as evidenced by the decline in abstention rates and the increasing access to social media, which has made it easier for millennials to access election information and foster political literacy. This is based on a survey by the Indonesian Association of Indonesian Voters Associations (APJII) and data from the General Elections Commission (KPU).

Referensi

- Bawamenewi, Adrianus, 'Implementasi Hak Politik Warga Negara', *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13.3 (2019), p. 43
- Shaleh, Chaerul, 'Hak Politik Warga Negara Dan Pemilu', *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, 1.1 (2023), pp. 17–26



Yusrin, and Salpina, 'Partisipasi Milenial Mengawasi Pemilu 2024', *Journal on Education*, 5.3 (2023), pp. 9646–53

Diakses dari GoodStats,

<https://data.goodstats.id/statistic/pierrerainer/sensus-bps-saat-ini-indonesia-didominasi-oleh-gen-z-n9kqv>, pada 1 Januari 2024.

Diakses dari,

[Diakses dari, <https://news.detik.com/pilkada/d-7656333/data-jumlah-pemilih-pilkada-2024-berdasarkan-usia-gen-z-25-69-milenial-33>](https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/09/24/media-sosial-favorit-gen-z-dan-milenial-indonesia#:~:text=Menurut%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa,09%25)%20sering%20mengakses%20Facebook, pada 30 Oktober 2024.</p></div><div data-bbox=)



ISLAM DAN DEMOKRASI: PERGULATAN PEMIKIRAN POLITIK DARI QUTB HINGGA HUWAIDI

MARZUKI MANURUNG¹

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR, FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM, UINSU, INDONESIA

Marzuki1100000173@uinsu.ac.id

NAZWA NADIA

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR, FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM, UINSU, INDONESIA

nadyanazwa43@gmail.com

HIDAYATUL MUNAWWARAH

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR, FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM, UINSU, INDONESIA

hidayatulo403233278@uinsu.ac.id

RIZKY MAULANA

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR, FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM, UINSU, INDONESIA

rizkyo403233272@uinsu.ac.id

Abstract

Artikel ini membahas relasi Islam dan demokrasi dalam wacana pemikiran politik Islam kontemporer. Kajian ini berangkat dari perdebatan klasik hingga modern mengenai kompatibilitas nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi. Tulisan ini menyoroti tiga corak pendekatan para pemikir Muslim. Pertama, kelompok yang menolak demokrasi seperti Sayyid Qutb yang menekankan *hakimiyyah Allah* dan menganggap demokrasi sebagai produk Barat yang bertentangan dengan syariat. Kedua, kelompok yang menerima demokrasi secara bersyarat sebagaimana dirumuskan Abu al-A'la Maududi dan Hasan al-Banna, yang menekankan perlunya penyaringan agar demokrasi tidak melabrak prinsip-prinsip Islam. Ketiga, kelompok harmonisasi yang diwakili antara lain oleh Fahmi Huwaidi, yang melihat demokrasi sejalan dengan nilai syura serta mampu diintegrasikan ke dalam kerangka politik Islam modern.



Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis komparatif terhadap teks dan gagasan para tokoh. Hasil kajian menunjukkan bahwa wacana Islam dan demokrasi tidak tunggal, melainkan plural dan dinamis. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterkaitan antara Islam dan demokrasi lebih tepat dipahami sebagai ruang dialektika, bukan sebagai oposisi biner.

Keywords: *Islam, democracy, Islamic politics*

A. Introduction

Perdebatan mengenai kesesuaian antara Islam dan demokrasi telah menjadi diskursus panjang dalam ranah pemikiran politik Islam modern. Sebagian pihak memandang bahwa demokrasi sebagai produk Barat tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam, sementara yang lain berargumen bahwa nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, musyawarah, dan kebebasan sejalan dengan ajaran Islam. Perbedaan pandangan ini memunculkan berbagai respons dari para tokoh pemikir Muslim kontemporer. Tokoh-tokoh seperti Abu al-A'la Maududi, Hasan al-Banna, dan Sayyid Quthb, misalnya, memiliki interpretasi yang beragam mengenai bagaimana Islam dapat atau tidak dapat berdampingan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemikiran mereka mencerminkan dinamika antara upaya mempertahankan otentisitas ajaran Islam dan kebutuhan akan sistem pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat modern. Dalam konteks ini, muncul pula gagasan tentang bagaimana nilai-nilai syariah dapat



diimplementasikan dalam sistem demokrasi modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia, partisipasi politik, dan supremasi hukum. Artikel ini akan menguraikan perdebatan tersebut, menggali pemikiran tokoh-tokoh Islam modern, serta mengeksplorasi kemungkinan integrasi nilai-nilai syariah dalam kerangka demokrasi masa kini.

B. Method

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan tema Islam dan demokrasi. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan tulisan-tulisan tokoh Islam modern. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan pandangan para tokoh seperti Sayyid Qutb, Al-Maududi, dan Fahmi Huwaidi, kemudian membandingkan serta mengkaji relevansi pemikiran mereka terhadap konsep demokrasi modern. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kritis mengenai dinamika hubungan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi.

C. Result and Discussion

A. Debat tentang Kesesuain Islam dan Demokrasi

a. Kelompok Yang Menentang Hubungan Islam Dan Demokrasi



Salah satu penentang demokrasi, Sheikh Fadlullah Nuri, berpendapat bahwa demokrasi menjamin kesetaraan bagi semua warga negara, yang tidak dapat dibayangkan dalam Islam. Anda tidak dapat menghindari perbedaan seperti orang beriman dan tidak beriman, kaya dan miskin, ahli hukum Islam dan ahli fikih, dan pengikut mereka. Itu juga hukum buatan manusia. Tidak seorang pun dapat mengatur hukum Islam. Definisi demokrasi konstitusional Islam saling bertentangan. Karena Islam sempurna dan mengatur semua bagian kehidupan. Selain itu, Sayyid Quthub, seorang anggota Ikhwanul Muslimin Mesir, dengan penuh semangat menentang demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dia percaya itu menentang kekuasaan Tuhan dan merupakan tirani oleh manusia tertentu atas yang lain. Mengakui kekuasaan Tuhan menyiratkan menentang semua kekuasaan manusia. Syariah, atau aturan Tuhan, adalah sistem hukum dan moral yang lengkap, karenanya undang-undang manusia tidak diperlukan.¹

Pemimpin FIS (Front Islamique du Salut) Aljazair, Ali Benhadj, sering mengklaim bahwa demokrasi adalah gagasan Yahudi-Kristen yang harus digantikan oleh otoritas Islam. Menurut Ali Benhadj, para pemikir Barat menganggap demokrasi itu salah. Misalnya, suara mayoritas dalam sistem

¹ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi Civil Society, Syariah, Ham, Fundamentalisme Anti Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal, 94-95



demokrasi mudah ditolak karena hak dan keadilan tidak dapat diukur. Meningkatnya suara mayoritas tidak serta merta meningkatkan moralitas masyarakat. Demokrasi Barat menciptakan pemerintahan yang pro-Barat.²

b. Kelompok yang Mengakui Adanya Kesamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Demokrasi

Seperti bagian dari kelompok pertama, kelompok kedua percaya bahwa Islam memiliki nilai-nilai demokrasi tetapi mengakui perbedaannya. Sarjana Muslim Abul 'Ala al-Maududi dari Pakistan mengakui persamaan dan perbedaan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi dan Islam memiliki kesamaan, kata al-Maududi. Keadilan (42:15), kesetaraan (49:13), akuntabilitas dalam pemerintahan (4:58), hak oposisi (33:70, dan 4:35), misi Negara (22:4), dan musyawarah adalah wawasan bersama. Demokrasi Barat memberi warga negara hak kedaulatan total, tetapi demokrasi Islam atau sistem Syura membatasi kekuasaan dengan hukum ilahi. Suatu negara didirikan atas kedaulatan Tuhan dan menolak pembuatan hukum manusia. Pemerintahan Islam bersifat moderat, Teho-Demokratis. Pemerintahan demokrasi surgawi di mana hukum Tuhan membatasi kedaulatan rakyat. Bahkan jika rakyat setuju, suatu negara tidak dapat membuat hukum yang bertentangan dengan

² Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Histori*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal, 48



hukum Tuhan dari Al-Qur'an dan Hadits. Amerika, pelopor demokrasi, tidak akan mengadopsi undang-undang alkohol, tetapi pemerintah Islam akan melakukannya. Ini tidak berarti mengekang rasionalitas manusia atau mencegah aturan yang dibuat manusia. Semua masalah dan persoalan administratif tanpa penjelasan syariah yang jelas diputuskan oleh Muslim yang berkualifikasi.³

c. Kelompok yang Mengakui Kesamaan Antara Islam dan Demokrasi

Kelompok ketiga berpendapat bahwa Islam itu seperti demokrasi, tidak seperti dua kelompok lainnya. Islam itu demokratis dan mendukung demokrasi di seluruh dunia. Fahmi Huwaidi adalah salah satu dari beberapa filsuf Islam yang telah mendamaikan Islam dan demokrasi. Fahmi Huwaidi membahas masalah ini dengan berbagai argumen. Pertama, banyak hadis yang menegaskan bahwa Islam mengharuskan pemerintahan yang dipilih secara populer. Menurut hadis Muslim dari 'Auf bin Malik,' *Sebaik-baiknya imam-imam (penguasa) kalian adalah orang-orang yang kalian sukai dan mereka pun menyukai kalian, yang kalian doakan dan mereka pun mendoakan kalian. Sementara seburuk-buruknya imam kalian adalah yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, yang*

³ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Histori*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal, 49-50



kalian laknat dan mereka pun melaknat kalian''. Kedua, Islam menolak tirani, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Os. 2:258 mengkritik Namrudz, yang mengaku sebagai Tuhan dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ketiga, dalam Islam, pemilu adalah kesaksian orang-orang yang sudah dewasa tentang kelayakan seorang kandidat, dan Al-Qur'an memerintahkan mereka untuk tidak menyembunyikan kesaksian mereka, bersikap adil dan jujur, dan tidak menjadi saksi palsu. Keempat, demokrasi berusaha untuk menegakkan kembali kekhalifahan Khulafa Rasyidin, yang memberikan kebebasan. Kelima, Negara Islam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Keenam, menurut para ahli teori Islam seperti Al-Mawardi Imamah, kepemimpinan politik adalah kontrak sosial yang sah karena seorang penguasa yang menolak teguran dapat dicopot dari jabatannya dan diganti.⁴

Mereka termasuk Fahmi Huwaidi, yang terlibat dalam integrasi Islam-demokrasi, dan para filsuf Barat yang menerimanya tanpa filter. Mereka menganut demokrasi liberal Barat. Seperti Muhammad Said Al-Ashmawy dan Faraj Fada, yang menentang pemerintahan Tuhan. Seperti kelompok pertama atau kedua, dengan mencelanya sebagai dosa dan menyembunyikan totalitarianismenya. Islam sebagaimana

⁴ Fahmi Huwaidi dan Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*, Hal. 53-55



digambarkan dalam ideologi tidaklah autentik. Al-Ashmawwy mengatakan politik Islam tidaklah definitif. Kemanusiaan dan demokrasi adalah bagian dari perbaikan dan kemajuan sistem politik yang harus dianut Islam.⁵

B. Pemikiran Tokoh-Tokoh Modern Tentang Islam dan Demokrasi

a. Abu A'ala Maududi

Abu al-A'ala-Maududi lahir di Aurangabad, Hyderabad, Andra Pradesh, pada tanggal 25 September 1903 (3 Rajab 1321 H). Sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara, Al-Maududi dididik di rumah oleh ayahnya, pengacara lulusan Universitas Aligarh, Ahmad Sayid Hasan (1855-1919). Di sekolah menengah atas, ia masuk Madrasah Faqaniyat, sebuah sekolah agama yang menggabungkan sistem tradisional dan modern. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Dar 'Ulum Hyderabad, tetapi ayahnya meninggal dunia, sehingga ia melanjutkan pendidikannya sendiri. Ia menguasai bahasa Arab, Persia, Inggris, dan Urdu pada usia 20 tahun. Ia menulis Al-Jihad Fi al-Islam, sebuah karya yang cermat dan tajam tentang hukum Islam dalam perang dan damai, pada usia 20 tahun. Keterlibatannya dalam politik dimulai saat itu.⁶

⁵ Fahmi Huwaidi dan Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*, Hal. 59

⁶ Nasution, Harun, *Enslikopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 1992)



Al-Maududi berupaya menciptakan gerakan yang lebih inklusif melalui Jama'at al-Islami dari tahun 1940 hingga 1972. Setelah Pakistan dan India didirikan pada tahun 1947, jamaat tersebut dibagi menjadi Jama'at Islami India dan Pakistan, dan al-Maududi pindah ke Pakistan. Ia berupaya mendirikan Negara Islam dan masyarakat Islam sejati di negara ini. Al-Maududi berulang kali dipenjara karena mengkritik dan menentang kebijakan pemerintah Pakistan. Al-Maududi dieksekusi karena subversi sekte Ahmadiyah Qadian pada tahun 1953. Pemerintah Pakistan mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.⁷

Abu A'ala al-Maududi adalah seorang filsuf dan pemikir Islam terkemuka abad ke-20. Pandangannya yang konsisten bahwa Islam adalah sistem yang utuh yang harus diterapkan oleh umat Islam juga patut dicatat. Maududi percaya bahwa Negara Islam sangat penting. Ia percaya ajaran Islam yang komprehensif tidak dapat memberikan kekuatan politik yang dibutuhkan untuk menerapkannya (Madjid, t.t.: 41). Umat Islam harus berjuang untuk menguasai mesin pemerintahan karena manusia harus menaati hukum Tuhan. Al-Maududi percaya bahwa mencari kekuasaan untuk mempertahankan agama Tuhan adalah perbuatan baik dan tidak boleh disamakan

⁷ H.A Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan*, (Bandung:Mizan, 1998), hal. 241.



dengan ambisi kekuasaan. Ajaran Al-Maudi tumpang tindih dengan masyarakat dan negara Islam, termasuk keyakinan bahwa nilai-nilai demokrasi tidak dipegang oleh manusia dan kritik keras terhadap sistem monarki dalam ide-ide politik Islam. Dalam pemikiran politiknya, al-Maudi menekankan bahwa Tuhan berdaulat. Menurut Al-Qur'an, orang-orang beriman harus menaati hukum Allah dan Rasul-Nya sebagai hukum tertinggi. Tidak seorang pun Muslim dapat mengeluarkan hukum dan kasus yang dikeluarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Iman menolak penyimpangan dari hukuman Allah dan Rasul-Nya (an-Nur: 51).⁸

Al-Maududi menciptakan istilah Teodemokrasi, demokrasi yang berlandaskan pada ketuhanan, di mana umat Islam memiliki kekuasaan terbatas di bawah Allah. Ia mendasarkan politik Islamnya pada Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Maududi menginginkan negara yang menggunakan sistem Khilafah, yang mendasarkan hukumnya pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan menyatakan bahwa Allah memiliki kedaulatan penuh dan manusia memiliki kewenangan terbatas. Islam berlaku untuk semua orang, tanpa memandang geografi dan waktu. Dunia telah menemukan teknologi canggih, tetapi tanpa moralitas, semuanya akan menghancurkan umat manusia.

⁸ Abu A'la Al-Maududi, *Manadiu 'I- Islam, Damaskus, al-Qur'an al-Karim, Khilafah, Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1977)



Ilmu pengetahuan Barat dan kebijaksanaan Timur secara bertahap telah menegaskan ajaran Islam dari waktu ke waktu. Hal ini selalu terjadi dalam Q.S 41:52.⁹

b. Hasan al-Banna

Hasan al-Banna lahir pada tahun 1906 M di desa Mahmudiyyah, wilayah al Buhairah, Mesir. Ayahnya, Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna, merupakan seorang ulama hadis terkenal yang menulis berbagai kitab penting seperti Al-Fathur Rabbani dan Al-Fath Al-Rabbani Fi Tartib Musnad Al-Imam Ahmad. Sejak kecil, Hasan Al-Banna dikenal sebagai anak yang cerdas dan religius. Ia menempuh pendidikan awalnya di Madrasah Ar-Rasyad Ad-Diniyyah, lalu melanjutkan ke Madrasah I'dadiyah di Mahmudiyyah, sebelum pindah ke Darul Ulum di Kairo. Dalam perjalanan hidupnya, Al-Banna sangat tertarik dengan dunia tasawuf dan sempat bergabung dengan tarekat Sufi Al-Hasafiyyah. Ia juga aktif mengikuti kegiatan dzikir dan maulid serta rutin mengikuti ziarah kubur bersama kelompok tersebut. Namun, seiring waktu, ia berpaling dari pendekatan tarekat yang terlalu mistik dan bergabung dengan tarekat yang lebih aktif dan rasional, yaitu tarekat Al-Hasafiyyah Al-Khashafiyyah. Bahkan, ia terpilih menjadi sekretarisnya.

⁹ Ahmad Kursid, *Islam : Is Meaning and Message*, Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka salaman ITB, 1982).



Selama menjadi mahasiswa di Kairo (1923–1927), Al-Banna banyak membaca majalah dan buku-buku pembaruan Islam, seperti Al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridha, yang membentuk arah pemikirannya ke arah gerakan reformis. Ia juga banyak terpengaruh oleh ulama salafiyah seperti Syaikh Muhibuddin Al-Khatib. Ketika libur kuliah, Al-Banna aktif berdakwah dan berdiskusi dengan berbagai kalangan, bahkan hingga ke kedai kopi tempat berkumpulnya masyarakat biasa. Setelah lulus dari Darul Ulum tahun 1927, ia diangkat menjadi guru di kota Ismailiyyah. Di sana, ia mulai berdakwah secara lebih intensif kepada masyarakat sekitar. Kegiatannya berkembang pesat hingga pada 1928, ia mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin sebagai wadah perjuangan Islam dalam bidang sosial, pendidikan, dan politik. Organisasi ini kelak menjadi gerakan Islam paling berpengaruh di dunia Islam modern.¹⁰

Hasan al-Banna mengawali penjelasannya tentang integritas Islam dengan mengatakan bahwa Islam adalah negara atau pemerintahan dan rakyat. Gagasan Hasan al-Bannah bahwa Islam adalah negara dan bangsa didasarkan pada keimanan dan ibadah. Hasan al-Bannah menyimpulkan bahwa Barat secara brutal menyerang dan merendahkan Islam.

¹⁰ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 21- 26



Barat menggambarkan Islam sebagai agama kolonial yang membatasi kebebasan. Ibadah Islam tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, kekuatan militer, persiapan politik, atau jihad, menurut Barat.¹¹ Hasan menambahkan bahwa ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadits telah meletakkan dasar bagi masalah sipil, perdagangan, dan hukum. Menurut Hasan Al-Banna, kekuasaan berasal dari kehendak bebas dan pilihan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Ikhwanul Muslimin menganggap manusia memiliki kekuasaan. Al-Banna menjelaskan bahwa syura "merupakan bagian dari sistem Islam yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara" dan bahwa demokrasi merupakan alat perjuangan politik konstitusional oleh banyak partai. Ketika populasinya bertambah, syura dapat menggunakan demokrasi untuk melaksanakan negaranya.¹²

Sedangkan demokrasi yang menurut Hasan al-Banna adalah demokrasi pemerintahan konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang paling dekat dengan Islam.¹³ Hasan al-Banna membedakan syura dari demokrasi Barat dengan mengatakan bahwa syura adalah suara mayoritas yang

¹¹ Muhith Muhammad Ishaq, *Fiqh Politik Hasan Al-Banna*, (Jakarta: Robbani Press, 2012), p.33.

¹² Muhammad Azmi, *Perspektif Hasan Al-Banna Terhadap Islam Dan Demokrasi*, Vol.1,No.1, 2022, Hal. 16.

¹³ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm 21-26



didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk menjaga stabilitas pemimpin-rakyat, semua masalah harus ditangani oleh para ahli untuk memaksimalkan hasil. Hasan al-Banna tidak setuju dengan partai-partai di Mesir, terutama partai multipartai, karena ia melihat bahwa mereka memecah belah rakyat karena fanatisme mereka. Partai-partai yang ada juga gagal mewakili rakyat dan terkadang didirikan semata-mata untuk kekuasaan tanpa ideologi Islam. Semua partai menginginkan kekuasaan dan kekayaan, tetapi program mereka serupa. Dengan demikian, Hasan Al-Banna mendukung satu partai untuk membantu rakyat Mesir bersatu dan mencapai tujuan mereka. Sumber hukum dan batas-batas otoritas rakyat membedakan syura Islam dari demokrasi Barat. Demokrasi Barat percaya bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan dapat memutuskan segalanya dengan suara mayoritas. Dalam syura Islam, tidak semua topik diperbolehkan untuk dibahas. Akal budi dan pendapat manusia tidak dapat mengubah atau membahas masalah-masalah yang diamanatkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Musyawarah hanya diperbolehkan pada bidang-bidang yang sifatnya teknis atau tidak diatur secara khusus dalam syariat.¹⁴

¹⁴ Hasan Al-Banna, *Majmū'at Rasā'il al-Imām al-Shahīd Hasan al-Bannā*, (Kairo: Dar al-Da'wah, 1990), hlm. 231



c. Sayyid Qutb

Sayyid Qutb Ibrahim Husayn al-Syadzili lahir di Musha pada tanggal 9 Oktober 1906. Kota Musha terletak di pesisir barat Sungai Nil dekat Asyut, 235 kilometer selatan Kairo. Sebagian orang percaya Sayyid Qutb lahir di desa Qaha pada bulan September 1906, setahun setelah wafatnya Sheikh Muhammad Abduh. Sayyid Qutub menghafal Al-Qur'an sepuluh tahun kemudian. Setelah Qaryah, ia belajar di Dar al-'Ulum di Kairo hingga lulus. Sekitar tahun 1926.¹⁵ Sayyid Qutb masuk sekolah persiapan Tajhiziah Darul Ulum di Kairo pada tahun 1929. Universitas ini dikenal akan sastra Arab dan studi Islamnya. Hasan Al-Banna belajar di sana. Qutb memperoleh gelar sarjana pendidikan dari Darul Ulum, Kairo, pada tahun 1933. Ayah Sayyid Qutb meninggal di perguruan tinggi. Ia kehilangan ibunya pada tahun 1941. Qutb tidak bahagia dan kesepian setelah dua orang yang disayanginya meninggal. Namun, situasi ini meningkatkan kecerdasannya.¹⁶

Studi dan pengalamannya di AS memperdalam pemahamannya tentang masalah sosial yang disebabkan oleh materialisme tanpa Tuhan. Setelah kembali ke Mesir, ia merasa yakin bahwa Islam dapat menyelamatkan manusia dari materialisme dan membebaskan mereka dari barang-barang

¹⁵ Badarussyamsi, *Pemikiran Politik Sayyid Quthb tentang Pemerintahan Islam*, Tajdid, Vol. XIV, No.1, Januari-Juni 2015, hal. 165

¹⁶ Sayyid qutb, *Tafsir Fii Zilail Qur'an*, v.1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 406.



material yang tidak memuaskan.¹⁷ Ia mempelajari sastra dengan penulis ad-Dimuqrathiiyyah fi al-Islam Abbas Mahmud al-'Aqqad pada usia 20 tahun. Orang ini memengaruhi Sayyid Qutb. Sayyid Qutb dikaitkan dengan Al-'Aqqad selama 25 tahun, yang menyebabkan keterlibatan politik pertamanya. Keanggotaannya di Partai al-Wafd terjadi selama waktu ini. Ia berangkat untuk bergabung dengan Partai al-Haiha al-Sa'adiyyah, sebuah partai sempalan al-Wafd, tetapi hanya bertahan dua tahun. Itu mengakhiri keterlibatannya dengan partai-partai. Peristiwa yang menentukan profil Sayyid Qutb yang mengungkapkan rasa sayangnya pada 'Aqqad dan gaya berpikirnya.

Sayyid Qutb menganggap Islam sebagai hukum yang lengkap. Spiritualitas Islam mengatur dan memecahkan masalah-masalah masyarakat. Karena Al-Qur'an adalah prinsip utama Islam, maka ia adalah rujukan pertama dalam merumuskan hukum dan mengatur gaya hidup masyarakat. Jika ia dapat memecahkan masalah, maka ia harus demikian. Dengan menggunakan gagasan ini, Sayyid Qutb mencoba memberikan penafsiran baru terhadap Al-Qur'an untuk menyelesaikan semua kesulitan. Menurutnya, manusia harus kembali kepada Allah dan aturan hidup Al-Qur'an untuk menemukan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan

¹⁷ Sayyid qutb, *Tafsir Fii Zilail Qur'an*, v.1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 406



keadilan di dunia ini.¹⁸ Islam adalah satu-satunya ideologi yang membangun dan baik yang melampaui Kristen dan komunisme dalam hal keseimbangan dan kesejahteraan sosial.¹⁹ Dalam *Ma'alim Fii al-Thariq*, ia menekankan bahwa politik harus mencapai harmoni antara hukum Tuhan dan hukum alam dan menghilangkan konflik karena Islam mencari kepemimpinan etis, kebaikan, dan kesejahteraan umat.²⁰ Sayyid Quthb berpendapat bahwa penggunaan akal untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peristiwa alam, sejarah manusia, dan urusan supranatural, membatasi tindakan Tuhan, sedangkan Allah bersifat absolut dan tak terbatas.²¹

Qutb berpendapat bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat dicapai. Karena kedaulatan Tuhan telah dilanggar. Adalah kebodohan untuk menentang kekuasaan Tuhan. Negara Islam yang deliberatif diperlukan karena Islam menganggap syariah adalah sistem hukum dan moral yang lengkap. Sayyid Qutb menulis dalam tafsirnya bahwa "demokrasi bertentangan dengan Islam, demokrasi juga bertentangan dengan iman jika

¹⁸ Eposito. (, *Dinamika Kebangunan islam, Bakr siregar* (terj), Jakarta: Jakarta Press,), hal. 103

¹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Juz 'Ammah*, (Lebanon: Dar al-Falah, 1967), cet. V, hal. 255-256.

²⁰ Ali Rahmona, *Para Perintis Baru Islam*, Ilyas Hasan (terj), (Bandung:Mizan, 1995), hal. 167

²¹ Eposito, *Dinamika Kebangunan islam, Bakr siregar* (terj), Jakarta: Jakarta Press, 1997), hal. 103



Anda percaya bahwa manusia membuat hukum." Allah menyatakan dalam Q.s al-An'am: 57.²²

Quthb mengatakan pemerintahan Islam didasarkan pada keadilan, ketaatan rakyat, dan penalaran. Keadilan merupakan dasar hukum Islam untuk mencegah diskriminasi masyarakat. Keadilan bermula dari rasa keadilan yang sama bagi setiap orang. Kedua, rakyat taat kepada penguasa karena syariat yang berlaku dalam kehidupan berbangsa, bukan karena status mereka. Karena umat Islam taat kepada Ulil Amri karena kedudukan mereka dan syariat Allah dan Rasul-Nya. Quthb menegaskan premis ketiga, bahwa para penguasa bermusyawarah dalam setiap masalah pemerintahan. Al-Qur'an tidak mengatur hal-hal yang detail, sehingga umat Islam dapat berijtihad sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat untuk menciptakan format musyawarah yang optimal.²³

C. Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Sistem Demokrasi Modern

Demokrasi di negara kita telah berkembang dengan berbagai dinamika, tantangan utama dari berbagai kelompok sosial dan kegamaan yang menolak konsep demokrasi dan

²² Sayyid quthb, *Tafsir Fii Zhilal al-Qur'an: di bawah Naungan al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Pres), Hal. 157

²³ Siti Rahayu, *Konsep Demokrasi Menurut Muahammad abdu Dan Sayyid Quthb*, (STAI AL-Hidayah Bogor), hal.f 55-56.



kebijakan-kebijakannya. Di dalam Islam tidak ada dikatomi antara agama, negara, hukum, demokrasi, dan politik. Islam dan politik saling berkaitan erat, dimana Islam memandang politik sebagai cara menjaga umat. Tanpa politik, umat Islam tidak bisa bebas menjalankan syariat, sedangkan politik tanpa Islam yang ada hanya akan mengejar kekuasaan duniawi. Oleh karena itu implementasi nilai-nilai syariah dalam politik di Indonesia diperlukan sebagai panduan dalam dinamika perpolitikan. Mengenai demokrasi, ada beberapa poin yang perlu diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi, yaitu:

1. *Al-Musawah*, yaitu konsep kesetaraan untuk individu dalam hal martabat, derajat, dan juga posisi. Sesuai yang dijelaskan dalam Islam bahwa tidak ada perbedaan antara manusia seperti gender, ras, dan juga jabatan, melainkan keunggulan seseorang itu diukur dari tingkat ketakwaannya kepada Allah Swt.
2. *Al-Hurriyah*, yaitu kebebasan manusia harus didasarkan pada pertanggungjawaban moral dan hukum, baik di dunia dan akhirat. Setiap manusia memiliki kebebasan berpendapat dan memiliki hak untuk menentukan pilihannya tanpa ada intervensi dari pihak lain.



3. *Al-Ukhuwwah*, yaitu menyampaikan ungkapan tentang persaudaraan antar manusia berdasarkan kesetaraan mereka sebagai makhluk Allah yang berasal dari tanah yang sama.
4. *Al-Adalah*, yaitu konsep keadilan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu maupun anggota masyarakat.
5. *Al-Syura*, yaitu selalu menekankan musyawarah dan setiap masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam membahas hal-hal publik yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
6. *Al-Mas'uliyah*, yaitu prinsip tanggung jawab yang harus dilakukan setiap pemegang kekuasaan, karena kekuasaan adalah amanah yang harus dijaga dengan baik dan bukan sesuatu untuk dinikmati. Bagi para penguasa, amanah ini memiliki 2 makna, yaitu sebagai amanah dari Allah dan sebagai amanah dari rakyat.²⁴

Demokrasi merupakan kebutuhan zaman yang menjadi elemen utama pembentuk manusia saat ini dalam memberikan hak-hak dalam memilih, berfikir, dan berpendapat. Hukum Islam yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat memerlukan penyesuaian regulasi melalui politik. Ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya relevan dalam spiritual

²⁴ Rohman, A. N. (2019). *Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Praksis Demokrasi Di Indonesia*. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2(1–2), 86–97.
<https://doi.org/10.47313/jkik.v2i1-2.487>



tetapi juga relevan untuk dinamika politik yang mengatur kehidupan masyarakat.

Dalam Islam juga membahas tentang etika dalam berpolitik sehingga dapat membangun politik yang berakhlak. Para pejabat pemerintahan memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan dapat terwujud.²⁵ Negara juga seharusnya memberikan pendidikan politik kepada calon pemimpin sebagai bekal ilmu untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai sistem politik, nilai-nilai demokrasi, partisipasi warga negara, dan kesadaran politik.²⁶ Berikut beberapa prinsip etika politik yang harus dimiliki para pemegang kekuasaan sesuai dengan Islam:

1. Agama sebagai dasar etika kepemimpinan

Agama ialah elemen yang mampu melindungi manusia dari tindakan atau niat yang menyimpang. Karena itu, seorang pemimpin dipilih untuk menegakkan perintah-perintah, prinsip-prinsip, dan hukum-hukum Ilahi.

²⁵ NURDIN, M. S. I. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*.

<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MF49DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21>

²⁶ Rahmayanti, M., Khozin, K., & Nurhakim, M. (2024). *Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pendidikan Politik*. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 260. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.260-264>



2. *Amanat dalam berkuasa*

Ibnu Taimiyah juga mengulas prinsip amanat yang berlandaskan agama dalam karyanya yang terkenal, "*al-Siyasah al-Syar'iyyah*". Menurut Ibnu Taimiyah, dalam menunaikan amanat, terdapat dua aspek krusial: pertama, yang berhubungan dengan jabatan dan proses penunjukannya (*al-walâ'yât*), dan kedua, yang berkaitan dengan perbendaharaan atau kekayaan (*al-amwâl*).

3. *Bijaksana dan adil dalam penerapan hukum*

Islam sangat menekankan pentingnya akhlak yang luhur dalam setiap individu. Keadilan yang diterapkan oleh seorang pemimpin akan menciptakan keamanan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin dan pejabat politik yang memiliki etika politik yang adil dan bijaksana sangat penting untuk menciptakan negara yang stabil dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. *Kompeten dan pintar dalam bidangnya*

Ibnu Khaldun menyarankan empat prinsip bagi individu yang menduduki jabatan penting: kecerdasan, keadilan, kompetensi, serta kesehatan fisik dan mental. Seorang pemimpin dan pejabat politik juga perlu memiliki kecerdasan intelektual dan pengetahuan yang mendalam, serta keahlian dalam bidangnya.

5. *Musyawarah*



Musyawarah dianggap sebagai suatu kewajiban yang didasarkan pada perintah Allah kepada Rasul-Nya untuk melakukan musyawarah, yang tentunya lebih ditekankan lagi bagi para pengikut Rasul. Karena itu, apabila seorang pemimpin bersikap otoriter dan feodal, maka pengikut ataupun rakyatnya mungkin akan menjauh darinya. Jelas bahwa konsep musyawarah dalam Islam bertujuan untuk meminimalisir perselisihan.²⁷

A. Conclusion

Hubungan antara Islam dan demokrasi merupakan isu kompleks yang melahirkan beragam pandangan di kalangan pemikir Muslim. Sebagian menolak demokrasi karena dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan Tuhan, sementara yang lain mengakui adanya kesamaan nilai-nilai dasar seperti keadilan, musyawarah, dan kesetaraan. Bahkan, ada yang menerima demokrasi secara utuh sebagai bentuk partisipasi politik umat. Dalam konteks ini, penerapan demokrasi dalam masyarakat Muslim harus mempertimbangkan nilai-nilai syariah agar selaras dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip seperti musyawarah (syura), keadilan, tanggung jawab, dan etika kepemimpinan menjadi landasan penting bagi integrasi demokrasi dan Islam. Dengan demikian, demokrasi tidak harus dipandang sebagai sistem asing, tetapi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan bermartabat sesuai nilai-nilai Islam.

²⁷ Syaria, K. B., & Ilmu, G. (n.d.). *Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam*. September 2016, 1–6



B. References

- Ali Rahmona, Para Perintis Baru Islam, Ilyas Hasan (terj), (Bandung:Mizan, 1995),
- Abu A'la Al-Maududy, Manadiu 'I- Islam, Damaskus, al-Qur'an al-Karim, Khilafah, Kerajaan (Bandung: Mizan, 1977),
- Ahmad Kursid, Islam : Is Meaning and Message, Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka salaman ITB), 1982.
- Badarussyamsi, Pemikiran Politik Sayyid Quthb tentang Pemerintahan Islam, Tajdid, Vol. XIV, No.1, Januari-Juni 2015,
- Eposito. (, Dinamika Kebangunan islam, Bakr siregar (terj), Jakarta: Jakarta Press,),
- Fahmi Huwaidi dan Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi,
- Hasan Al-Banna, Majmū'at Rasā'il al-Imām al-Shahīd Hasan al-Bannā, (Kairo: Dar al-Da'wah, 1990),
- Hasan Al-Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, (Solo: Era Intermedia, 2005),
- H.A Mukti Ali, Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan, (Bandung:Mizan, 1998),



MEDIA SOSIAL DAN TRANSFORMASI KOMUNIKASI POLITIK

UMAR YADI IDRIS

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

umaryadiidris61@gmail.com

Abstract

Artikel ini membahas pengaruh media sosial terhadap komunikasi politik, tantangan penyebaran hoaks dan disinformasi, serta peran generasi muda dalam partisipasi politik di era digital. Media sosial telah mengubah pola komunikasi politik menjadi lebih interaktif dan partisipatif, dengan politisi dan masyarakat dapat berinteraksi secara langsung melalui berbagai platform digital. Namun, perubahan ini juga menghadirkan risiko berupa penyebaran informasi palsu yang dapat memengaruhi opini publik dan memicu polarisasi sosial. Generasi muda memiliki peran penting sebagai pengguna aktif media sosial yang dapat memobilisasi aksi politik dan menyebarkan informasi, meski juga harus menghadapi tantangan hoaks dan bias informasi. Melalui analisis konseptual dan tinjauan literatur terkait, artikel ini menekankan pentingnya literasi media dan kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem komunikasi politik digital yang sehat dan demokratis.

Keywords : Media Sosial, Komunikasi Politik, Hoaks, Partisipasi Generasi Muda



A. Introduction

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui media sosial, telah mengubah cara komunikasi politik secara fundamental. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga sebagai arena penting dalam pembentukan opini politik. Dengan lebih dari 4,76 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia, dan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna terbanyak, media sosial menawarkan potensi besar untuk komunikasi politik yang lebih interaktif dan partisipatif.¹

Transformasi ini membawa perubahan dari komunikasi politik yang bersifat satu arah menjadi lebih dua arah, di mana politisi dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun, tantangan juga muncul, seperti penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat memanipulasi opini publik. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial di Indonesia terpapar konten hoaks, yang berpotensi menciptakan polarisasi dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi politik. Selain itu, algoritma media sosial sering kali memperkuat pandangan yang sudah ada,

¹ Husniati, N., & Bik, M. T. N. (2025). DINAMIKA BAHASA DALAM MEDIA SOSIAL: PENGARUH PLATFORM DIGITAL TERHADAP GAYA BERBAHASA PENGGUNA. *Journal Education, Sociology and Law*, 1(1), 780-793.



membatasi paparan terhadap sudut pandang berbeda, dan menghambat dialog konstruktif.²

Di sisi lain, media sosial juga memberikan peluang bagi generasi muda untuk lebih aktif dalam politik. Mereka menggunakan platform ini untuk menyampaikan aspirasi dan memobilisasi aksi sosial, menjadikan media sosial sebagai katalisator bagi demokrasi partisipatif. Munculnya influencer politik dan figur publik digital juga menambah dimensi baru dalam komunikasi politik, di mana mereka dapat memengaruhi opini publik dengan cara yang tidak konvensional.³

Namun, isu keamanan data dan privasi pengguna menjadi perhatian serius, terutama setelah skandal besar yang mengungkap penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menuntut adanya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak individu dan menjaga integritas proses demokrasi. Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana aktor politik memanfaatkan media sosial, bagaimana masyarakat mengonsumsi dan memproduksi informasi politik, serta bagaimana regulasi dan literasi digital dapat dioptimalkan.⁴

² Hia, E. F., & Siahaan, C. (2021). Komunikasi Politik Di Era Digital. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 6-18.

³ Saputra, M. A., & Supriono, S. (2024). Pengaruh Media Masa Terhadap Partisipasi Pemuda Dalam Politik. *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 14(II), 117-122.

⁴ Aditama, P., Sinaga, E. A., & Putri, C. A. (2025). Perbandingan Hukum Pidana Cyber Crime Dan Pengaruhnya Dalam Penegakan Hukum Antara Indonesia Dan Amerika. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 58-76.



Dalam konteks ini, artikel ini berusaha menjawab beberapa persoalan, yakni, bagaimana media sosial memengaruhi komunikasi politik di Indonesia?, tantangan apa yang dihadapi dalam penyebaran informasi politik di era digital?, dan bagaimana peran generasi muda dalam memanfaatkan media sosial untuk partisipasi politik. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika komunikasi politik dalam era media sosial, menganalisis dampak dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan wawasan analitis dan solusi praktis berdasarkan data dan isu-isu kekinian yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai komunikasi politik di era digital dan rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan, politisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem komunikasi politik yang sehat dan produktif.

B. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Konten untuk memahami pola komunikasi politik di era media sosial. Metode ini dipilih karena kemampuannya menggali bagaimana pesan politik disampaikan dan diterima oleh publik melalui platform digital seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Analisis konten



memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dan konteks dari pesan yang disampaikan.⁵

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data berupa postingan, komentar, dan konten lain dari politisi, partai politik, dan influencer politik selama periode yang relevan dengan isu politik terkini, seperti masa kampanye pemilu. Data dikumpulkan secara selektif dan sistematis untuk memastikan representasi yang akurat.⁶

Konten yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pembacaan dan pengkodean. Analisis ini berfokus pada tema utama, narasi, dan strategi komunikasi yang diterapkan, serta interaksi audiens terhadap pesan. Pendekatan manual ini memungkinkan peneliti menangkap nuansa komunikasi yang sulit ditangkap oleh metode otomatisasi.⁷

Metode ini juga mengevaluasi efektivitas pesan politik dan tantangan yang muncul, seperti penyebaran informasi tidak akurat dan polarisasi sosial. Dengan demikian, Analisis Konten memberikan gambaran komprehensif mengenai komunikasi politik di era media sosial, mengintegrasikan perspektif teoritis dan empiris yang relevan, serta menawarkan wawasan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan komunikasi politik digital.⁸

⁵ Asfar, I. T., & Taufan, I. (2019). Analisis naratif, analisis konten, dan analisis semiotik (Penelitian kualitatif). *no. January*, 1-13.

⁶ Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., Mm, C. Q. M., Santoso, Y. H., ... & Eliyah, S. K. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.

⁷ Martha, A. (2025). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Methods pada Era Digital*. Takaza Innovatix Labs.

⁸ Anam, S., & Syaiful, S. (2024). PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK: ANALISIS TERHADAP



C. Result and Discussion

A. Pengaruh Media Sosial terhadap Komunikasi

Media sosial telah merevolusi cara komunikasi politik berlangsung, menggeser pola yang sebelumnya bersifat linier dan satu arah menjadi interaksi dua arah yang lebih dinamis dan partisipatif. Dalam konteks ini, politisi dan partai politik tidak hanya menjadi penyampai pesan, namun juga peserta aktif yang membangun dialog dengan masyarakat melalui platform digital seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Pendekatan komunikasi yang interaktif ini secara signifikan memperluas jangkauan dan kedalaman hubungan antara aktor politik dan publik, memungkinkan respons yang lebih cepat dan dialog yang lebih terbuka.⁹

Di Indonesia, peran media sosial dalam komunikasi politik semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Pemilu 2019 menjadi contoh penting di mana penggunaan media sosial mendominasi strategi kampanye calon legislatif dan partai politik.¹⁰ Strategi yang melibatkan digital marketing, data analitik, dan micro-targeting

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 224-233.

⁹ Tambawang, L., Sawir, M., & Pongtuluran, R. (2024). Melihat ke Belakang: Panggung Gemoy dan Dinamika Politik Masa Kini. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(3).

¹⁰ Akhsani, F. Y. *STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GERINDRA DI MEDIA SOSIAL TIKTOK MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024* (Bachelor's thesis, Falkutas Dakwah Dan Komunikasi).



memungkinkan pesan yang disampaikan menjadi lebih terpersonalisasi dan relevan bagi masing-masing segmen pemilih.¹¹ Kondisi ini mencerminkan bahwa media sosial bukan hanya platform komunikasi biasa, tetapi juga alat strategis yang efektif untuk mobilisasi politik dan membangun opini publik yang luas.¹²

Komunikasi politik melalui media sosial juga telah memperkaya variasi konten dan gaya komunikasi yang digunakan. Politisi dapat memakai berbagai format, mulai dari teks singkat, gambar, video hingga siaran langsung yang interaktif.¹³ Format yang lebih visual dan naratif ini mempermudah penyampaian pesan yang kompleks dalam bentuk yang lebih mudah dicerna audiens. Selain itu, kebebasan untuk berpartisipasi secara langsung melalui komentar dan berbagi konten membuka ruang dialog yang selama ini terbatas di media konvensional.¹⁴

Fenomena komunikasi politik di media sosial juga membawa perubahan terhadap pola keterlibatan masyarakat. Platform digital memungkinkan audiens tidak hanya sebagai konsumen informasi, melainkan juga sebagai

¹¹ Tarumingkeng, I. R. C. Peluang, Tantangan dan Implikasi.

¹² Putranto, A. (2024). *Komunikasi Politik*. Cendikia Mulia Mandiri.

¹³ Tosepu, Y. A. (2018). *Media baru dalam komunikasi politik (komunikasi politik i dunia virtual)*. Jakad Media Publishing.

¹⁴ JUNAEDI, S., KARYONO, H., PURWANTI, E., & PRASETYOWATI, D. VARIASI BAHASA KONTEN KREATOR: STRATEGI EFEKTIF UNTUK MENINGKATKAN ENGAGEMENT.



produsen konten serta pemicu penyebaran pesan politik melalui interaksi dan partisipasi aktif, termasuk dalam kampanye daring dan aksi sosial.¹⁵ Generasi muda khususnya, dengan kecakapan digital mereka, menjadi aktor sentral dalam ekosistem komunikasi politik modern ini, menjadikan suara mereka lebih terdengar dan berpengaruh.¹⁶

Namun, perlu diakui bahwa perubahan ini tak terlepas dari tantangan dan risiko. Interaktivitas yang tinggi dalam media sosial juga membuka peluang bagi manipulasi opini melalui penyebaran hoaks dan informasi yang tidak akurat.¹⁷ Kecepatan penyebaran informasi digital sering kali tidak diimbangi dengan mekanisme verifikasi yang cukup, yang mengakibatkan potensi polarisasi dan disintegrasi sosial meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan komunikasi politik di media sosial memerlukan keseimbangan antara inklusivitas partisipatif dan keteraturan informasi yang dapat dipercaya.¹⁸

Secara teoritis, fenomena ini mendorong kajian ulang terhadap konsep komunikasi politik tradisional. Media sosial memperkenalkan konsepsi komunikasi yang lebih terbuka

¹⁵ Heryanto, G. G. (2018). *Media komunikasi politik*. IRCiSoD.

¹⁶ Islami, A. I. (2022). *Saintis muda di era digital*. Alinea Media Dipantara.

¹⁷ Ningrum, D. H. P. P., Junaidi, F., Julyanti, A. D., Tsalitsa, F. A., & Renasva, S. M. (2024). FENOMENA LIVE STREAMING SEBAGAI TANTANGAN BARU DALAM ETIKA PENYIARAN MODERN. *PUBLIC CORNER*, 19(2), 45-61.

¹⁸ Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.



dan interaktif, yang tidak lagi mengedepankan dominasi pesan dari elite politik kepada massa, melainkan menempatkan audiens sebagai partisipan aktif yang turut membentuk pesan politik itu sendiri.¹⁹ Pendekatan ini menuntut metode analisis yang mampu menangkap kompleksitas interaksi serta peran ganda individu sebagai konsumen dan produsen informasi politik.

Dapat dikatakan bahwa media sosial memberikan kontribusi penting dalam mengubah lanskap komunikasi politik menjadi lebih partisipatif, dinamis, dan berbasis digital. Namun, perubahan ini juga mengharuskan keterlibatan aktif semua pihak untuk menciptakan ekosistem komunikasi politik yang sehat, yang mampu meminimalkan dampak negatif sekaligus memaksimalkan potensi demokrasi digital di era modern.²⁰

B. Tantangan Penyebaran Hoaks dan Disinformasi dalam Komunikasi Politik di Era Media Sosial

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi yang paling berpengaruh, terutama dalam konteks politik. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan individu dan organisasi

¹⁹ Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. (2020). Komunikasi massa. *Komunikasi Massa*.

²⁰ Iskandar, A., Winata, W., Kurdi, M. S., Sitompul, P. H. S., Kurdi, M. S., Nurhayati, S., ... & Haluti, F. (2023). *Peran teknologi dalam dunia pendidikan*. Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.



untuk berbagi informasi dengan cepat dan luas. Namun, dengan kemudahan ini juga muncul tantangan besar, yaitu penyebaran hoaks dan disinformasi.²¹ Fenomena ini tidak hanya memengaruhi cara orang mendapatkan informasi, tetapi juga dapat mengubah persepsi publik dan memengaruhi keputusan politik.

Hoaks, yang didefinisikan sebagai informasi yang salah atau menyesatkan yang sengaja dibuat dan disebar untuk menipu orang lain, telah menjadi masalah yang semakin mendesak. Di sisi lain, disinformasi mencakup informasi yang salah atau menyesatkan yang mungkin tidak selalu disebar dengan niat jahat, tetapi tetap memiliki dampak negatif.²² Dalam konteks politik, kedua fenomena ini dapat digunakan untuk merusak reputasi lawan politik, memanipulasi opini publik, dan memengaruhi hasil pemilihan umum.

Media sosial menyediakan platform yang ideal untuk penyebaran hoaks dan disinformasi. Dengan jutaan pengguna yang aktif, informasi dapat menyebar dengan cepat dan luas. Penelitian menunjukkan bahwa informasi yang sensasional dan emosional lebih mungkin untuk

²¹ Rahma, A. A. R., Ardianti, H., & Firman, K. (2024). Peran media sosial dalam dinamika sosial masyarakat kontemporer. *Jurnal Komunikasi Digital Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 24-29.

²² Kustiawan, W., Sajida, I., Bahri, F. F., Safitri, I., Mardiah, A., Manurung, A. F. Q., & Thariq, M. I. (2024). Peran Media Online dalam Mengatasi Hoaks & Misinformasi. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 4(2), 278-288.



dibagikan, sehingga hoaks sering kali mendapatkan lebih banyak perhatian dibandingkan dengan informasi yang akurat.²³ Selain itu, algoritma media sosial cenderung mempromosikan konten yang menarik perhatian, yang sering kali termasuk hoaks. Hal ini menciptakan lingkungan di mana informasi yang salah dapat dengan mudah mengalahkan fakta yang benar.

Dampak dari penyebaran hoaks dan disinformasi sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa informasi yang salah dapat memengaruhi sikap dan perilaku pemilih. Misalnya, hoaks yang menyangkut calon politik tertentu dapat merusak reputasi mereka dan memengaruhi hasil pemilihan. Selain itu, disinformasi dapat menciptakan polarisasi di masyarakat, di mana individu hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, sehingga memperkuat bias dan mengurangi dialog yang konstruktif.²⁴

Di Indonesia, penyebaran hoaks dan disinformasi telah menjadi masalah serius, terutama menjelang pemilihan umum. Kasus-kasus hoaks yang menyangkut isu-isu sensitif

²³ Rusydi, M. T., Baradja, A., Sudalyo, R. A. T., Mukti, B., Oktaviandre, F., & Nugrohotomo, G. K. (2024). PELATIHAN DETEKSI HOAX UNTUK PELAJAR DI SMKN 1 KISMANTORO WONOGIRI, JAWA TENGAH. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 75-80.

²⁴ Swari, N. K. T. N., Pramana, G. I., & Noak, P. A. (2025). DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN KAMPANYE DIGITAL TERHADAP PERILAKU PEMILIH PEMULA (GEN Z) DALAM PILKADA BALI. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(5), 61-70.



seperti agama, ras, dan politik sering kali muncul dan menyebar dengan cepat di media sosial. Selama pemilu 2019, banyak hoaks yang beredar mengenai calon presiden dan partai politik, yang berpotensi memengaruhi keputusan pemilih.²⁵ Dalam beberapa kasus, hoaks ini bahkan dapat memicu ketegangan sosial dan konflik di masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai langkah dapat diambil. Pertama, penting untuk meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja media sosial dan bagaimana mengenali informasi yang salah, individu dapat lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka terima.²⁶ Pendidikan tentang literasi media harus dimulai sejak dini, sehingga generasi mendatang dapat lebih siap menghadapi tantangan informasi yang kompleks.

Kedua, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mengatasi penyebaran hoaks. Banyak platform telah mulai menerapkan kebijakan untuk menandai atau menghapus konten yang terbukti salah. Namun, tantangan tetap ada dalam menentukan apa yang dianggap sebagai informasi yang salah dan bagaimana cara menegakkan kebijakan tersebut. Transparansi dalam proses ini sangat

²⁵ Adiputra, W. M., & Kurnia, N. (2019). YUK, LAWAN HOAKS POLITIK, Ciptakan Pemilu Damai!.

²⁶ Kosasih, E. (2019). Literasi Media sosial dalam pemyarakatan sikap moderasi beragama. *Jurnal Bimas Islam Vol, 12*(2), 264.



penting agar pengguna merasa percaya pada upaya yang dilakukan oleh platform.²⁷

Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan platform media sosial sangat penting. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memerangi hoaks dan disinformasi, termasuk kampanye informasi yang bertujuan untuk memberikan fakta yang akurat kepada publik. Selain itu, dukungan dari komunitas akademis juga diperlukan untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang penyebaran hoaks dan dampaknya, sehingga langkah-langkah yang diambil dapat didasarkan pada data yang valid.²⁸

Penyebaran hoaks dan disinformasi di era media sosial merupakan tantangan serius bagi komunikasi politik. Dampaknya dapat merusak kepercayaan publik, memengaruhi keputusan politik, dan menciptakan polarisasi di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam meningkatkan literasi media, memperkuat kebijakan platform media sosial, dan

²⁷ ALFIANA, V. (2024). *ANALISIS PERSPEKTIF MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI ANGKATAN 2020 UNISSULA TENTANG TIKTOK SEBAGAI MEDIA KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DALAM PEMILU 2024* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

²⁸ Kustiawan, W., Sajida, I., Bahri, F. F., Safitri, I., Mardiah, A., Manurung, A. F. Q., & Thariq, M. I. (2024). Peran Media Online dalam Mengatasi Hoaks & Misinformasi. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 4(2), 278-288.



membangun kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, kita dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan mendukung demokrasi yang lebih kuat.²⁹

C. Peran Generasi Muda dalam Partisipasi Politik Melalui Media Sosial

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk memfasilitasi partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda. Generasi muda, yang sering kali lebih akrab dengan teknologi dan platform digital, memiliki potensi besar untuk memengaruhi proses politik melalui media sosial. Dengan kemampuan untuk berbagi informasi, berorganisasi, dan menyuarakan pendapat secara luas, generasi muda dapat memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik dan memengaruhi keputusan politik.³⁰

Salah satu aspek utama dari partisipasi politik generasi muda melalui media sosial adalah kemampuan mereka untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Media sosial menyediakan platform di mana berita dan informasi dapat

²⁹ Nuraliza, V., Rahmadi, A. N., Mubaroq, A., Kristiyono, K., Melani, A. P., & Ifana, A. (2024). Peran komunikasi politik dalam membentuk opini publik menghadapi Pemilu 2024. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(1), 245-261.

³⁰ Bondar, L. A. S., & Siregar, H. (2025). Partisipasi Mahasiswa Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara Tahun 2024 di Era Digital (Studi di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 4378-4390.



disebarkan dalam hitungan detik. Hal ini memungkinkan generasi muda untuk tetap terinformasi tentang isu-isu politik terkini, kampanye pemilihan, dan kebijakan pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda cenderung lebih aktif dalam mencari informasi politik melalui media sosial dibandingkan dengan generasi yang lebih tua.³¹ Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai sumber informasi yang penting bagi mereka.

Selain itu, media sosial juga memungkinkan generasi muda untuk berpartisipasi dalam diskusi politik secara lebih aktif. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memberikan ruang bagi individu untuk berbagi pandangan, berdiskusi, dan berdebat tentang isu-isu yang mereka anggap penting. Diskusi ini tidak hanya terbatas pada lingkaran teman atau keluarga, tetapi dapat meluas ke audiens yang lebih besar, menciptakan ruang untuk dialog yang lebih inklusif dan beragam.³²

Salah satu contoh nyata dari partisipasi politik generasi muda melalui media sosial adalah gerakan #BlackLivesMatter yang muncul di Amerika Serikat. Gerakan ini, yang berfokus pada isu-isu keadilan sosial dan hak asasi

³¹ Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastris, E., Usni, U., & Gunanto, D. (2022). Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(1), 53-66.

³² Farid, A. S. (2023). Penggunaan media sosial dalam kampanye politik dan dampaknya terhadap partisipasi politik dan persepsi publik. *QAULAN: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 45-50.



manusia, berhasil menarik perhatian global berkat penggunaan media sosial. Generasi muda memainkan peran kunci dalam menyebarkan informasi, mengorganisir protes, dan menggalang dukungan untuk perubahan kebijakan.³³ Penelitian menunjukkan bahwa media sosial memungkinkan gerakan ini untuk berkembang dengan cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap isu-isu yang diangkat.

Di Indonesia, fenomena serupa juga terlihat dalam berbagai gerakan sosial yang dipelopori oleh generasi muda. Misalnya, gerakan #ReformasiDikorupsi yang muncul sebagai respons terhadap isu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Melalui media sosial, generasi muda berhasil mengorganisir demonstrasi, menyebarkan informasi, dan menggalang dukungan dari masyarakat luas.³⁴ Penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai alat mobilisasi yang efektif, memungkinkan generasi muda untuk bersatu dan menyuarakan aspirasi mereka secara kolektif.

³³ Aura, S., & Abidin, M. Z. (2025). Analisis Dampak Protes Black Lives Matter (BLM) Terhadap Penerimaan Sosial Di Amerika Serikat. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 2(2), 1-24.

³⁴ Ramadhan, R. S. *Konstruksi Pemberitaan Keterlibatan Pelajar Dalam Aksi Demonstrasi# ReformasiDikorupsi Pada Media Online Detik. com* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi).



Namun, meskipun media sosial menawarkan banyak peluang untuk partisipasi politik, ada juga tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda. Salah satu tantangan utama adalah penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Di era informasi yang cepat, generasi muda sering kali terpapar pada berita palsu yang dapat memengaruhi pandangan dan keputusan politik mereka.³⁵ Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memiliki keterampilan literasi media yang baik, sehingga mereka dapat membedakan antara informasi yang akurat dan yang menyesatkan.

Selain itu, ada juga risiko polarisasi yang dapat muncul akibat penggunaan media sosial. Diskusi politik yang berlangsung di platform ini sering kali bersifat emosional dan dapat memicu konflik antara kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat memperkuat bias dan menciptakan ruang gema, di mana individu hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri.³⁶ Hal ini dapat menghambat dialog yang konstruktif dan mengurangi kemampuan generasi muda untuk memahami perspektif yang berbeda.

³⁵ Agustin, D. (2024). Peran Komunikasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik melalui Media Sosial di Kalangan Pemilih Pemula. *Circle Archive*, 1(6).

³⁶ Sulianta, F. (2024). *Resolusi Konflik Ranah Digital*. Feri Sulianta.



Di samping tantangan tersebut, generasi muda juga memiliki kesempatan untuk berinovasi dalam cara mereka berpartisipasi dalam politik. Dengan memanfaatkan teknologi baru, seperti aplikasi mobile dan platform crowdfunding, mereka dapat menciptakan kampanye yang lebih interaktif dan menarik. Misalnya, beberapa organisasi pemuda telah menggunakan aplikasi untuk mengumpulkan suara dan pendapat masyarakat mengenai isu-isu tertentu, sehingga menciptakan ruang bagi partisipasi yang lebih luas dan inklusif.³⁷ Inovasi semacam ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan, tetapi juga memberikan suara kepada mereka yang mungkin tidak terwakili dalam proses politik tradisional.

Lebih jauh lagi, generasi muda juga dapat berperan sebagai agen perubahan dengan memanfaatkan media sosial untuk mendidik dan menginformasikan masyarakat tentang isu-isu penting. Mereka dapat menggunakan platform ini untuk menyebarkan pengetahuan tentang hak-hak politik, proses pemilihan, dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Dengan cara ini, generasi muda tidak hanya berpartisipasi dalam politik, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran politik di kalangan masyarakat secara keseluruhan.

³⁷ Azizah, S., Pt, S., & Sos, M. (2025). Pengembangan Masyarakat. *Pengembangan Masyarakat Berbasis Digital*, 54.



Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, penting untuk menekankan bahwa generasi muda memiliki potensi yang sangat besar dalam memengaruhi politik melalui media sosial. Mereka tidak hanya dapat menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen dan penyebar informasi yang dapat mendorong perubahan sosial. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik yang positif dan konstruktif.

D. Conclusion

Artikel ini membahas pengaruh media sosial terhadap komunikasi politik, yang telah bertransformasi dari pola linier menjadi interaksi dua arah yang lebih dinamis. Di Indonesia, pemilu 2019 menunjukkan bagaimana media sosial menjadi alat strategis dalam kampanye politik, memungkinkan politisi untuk menjangkau pemilih dengan lebih efektif melalui digital marketing dan micro-targeting.

Namun, tantangan besar muncul dengan penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi publik dan keputusan politik. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial sering kali tidak diimbangi dengan verifikasi yang memadai, yang berpotensi menyebabkan polarisasi di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan literasi media dan kolaborasi antara berbagai pemangku



kepentingan sangat penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat.

Generasi muda, yang lebih akrab dengan teknologi, memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dalam politik melalui media sosial. Mereka dapat mengorganisir gerakan sosial dan menyebarkan informasi yang mendidik masyarakat, meskipun harus menghadapi tantangan seperti hoaks. Dengan dukungan yang tepat, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada peningkatan kesadaran politik dan partisipasi demokratis.

E. References

- Adiputra, W. M., & Kurnia, N. (2019). YUK, LAWAN HOAKS POLITIK, CIPTAKAN PEMILU DAMAI!.
- Aditama, P., Sinaga, E. A., & Putri, C. A. (2025). Perbandingan Hukum Pidana Cyber Crime Dan Pengaruhnya Dalam Penegakan Hukum Antara Indonesia Dan Amerika. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 58-76.
- Agustin, D. (2024). Peran Komunikasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik melalui Media Sosial di Kalangan Pemilih Pemula. *Circle Archive*, 1(6).
- Akhsani, F. Y. STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GERINDRA DI MEDIA SOSIAL TIKTOK MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024 (Bachelor's thesis, Falkutas Dakwah Dan Komunikasi).
- ALFIANA, V. (2024). ANALISIS PERSPEKTIF MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI ANGKATAN 2020 UNISSULA TENTANG TIKTOK SEBAGAI MEDIA KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DALAM PEMILU 2024 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Anam, S., & Syaiful, S. (2024). PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK: ANALISIS TERHADAP PROSES PENGAMBILAN



- KEPUTUSAN PUBLIK. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 224-233.
- Asfar, I. T., & Taufan, I. (2019). Analisis naratif, analisis konten, dan analisis semiotik (Penelitian kualitatif). *no. January*, 1-13.
- Aura, S., & Abidin, M. Z. (2025). Analisis Dampak Protes Black Lives Matter (BLM) Terhadap Penerimaan Sosial Di Amerika Serikat. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 2(2), 1-24.
- Azizah, S., Pt, S., & Sos, M. (2025). Pengembangan Masyarakat. *Pengembangan Masyarakat Berbasis Digital*, 54.
- Bondar, L. A. S., & Siregar, H. (2025). Partisipasi Mahasiswa Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara Tahun 2024 di Era Digital (Studi di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 4378-4390.
- Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., Usni, U., & Gunanto, D. (2022). Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(1), 53-66.
- Farid, A. S. (2023). Penggunaan media sosial dalam kampanye politik dan dampaknya terhadap partisipasi politik dan persepsi publik. *QAULAN: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 45-50.
- Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. (2020). Komunikasi massa. *Komunikasi Massa*.
- Heryanto, G. G. (2018). *Media komunikasi politik*. IRCiSoD.
- Hia, E. F., & Siahaan, C. (2021). Komunikasi Politik Di Era Digital. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 6-18.
- Husniati, N., & Bik, M. T. N. (2025). DINAMIKA BAHASA DALAM MEDIA SOSIAL: PENGARUH PLATFORM DIGITAL TERHADAP GAYA BERBAHASA PENGGUNA. *Journal Education, Sociology and Law*, 1(1), 780-793.



- Iskandar, A., Winata, W., Kurdi, M. S., Sitompul, P. H. S., Kurdi, M. S., Nurhayati, S., & Haluti, F. (2023). *Peran teknologi dalam dunia pendidikan*. Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.
- Islami, A. I. (2022). *Saintis muda di era digital*. Alinea Media Dipantara.
- JUNAEDI, S., KARYONO, H., PURWANTI, E., & PRASETYOWATI, D. VARIASI BAHASA KONTEN KREATOR: STRATEGI EFEKTIF UNTUK MENINGKATKAN ENGAGEMENT.
- Kosasih, E. (2019). Literasi Media sosial dalam pemasyarakatan sikap moderasi beragama. *Jurnal Bimas Islam Vol, 12(2)*, 264.
- Kustiawan, W., Sajida, I., Bahri, F. F., Safitri, I., Mardiah, A., Manurung, A. F. Q., & Thariq, M. I. (2024). Peran Media Online dalam Mengatasi Hoaks & Misinformasi. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies, 4(2)*, 278-288.
- Kustiawan, W., Sajida, I., Bahri, F. F., Safitri, I., Mardiah, A., Manurung, A. F. Q., & Thariq, M. I. (2024). Peran Media Online dalam Mengatasi Hoaks & Misinformasi. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies, 4(2)*, 278-288.
- Martha, A. (2025). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Methods pada Era Digital*. Takaza Innovatix Labs.
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., Mm, C. Q. M., Santoso, Y. H., & Eliyah, S. K. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Ningrum, D. H. P. P., Junaidi, F., Julyanti, A. D., Tsalitsa, F. A., & Renasva, S. M. (2024). FENOMENA LIVE STREAMING SEBAGAI TANTANGAN BARU DALAM ETIKA PENYIARAN MODERN. *PUBLIC CORNER, 19(2)*, 45-61.
- Nuraliza, V., Rahmadi, A. N., Mubaroq, A., Kristiyono, K., Melani, A. P., & Ifana, A. (2024). Peran komunikasi politik dalam membentuk opini publik menghadapi Pemilu 2024. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan, 4(1)*, 245-261.



- Putranto, A. (2024). *Komunikasi Politik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Rahma, A. A. R., Ardianti, H., & Firman, K. (2024). Peran media sosial dalam dinamika sosial masyarakat kontemporer. *Jurnal Komunikasi Digital Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 24-29.
- Ramadhan, R. S. *Konstruksi Pemberitaan Keterlibatan Pelajar Dalam Aksi Demonstrasi# ReformasiDikorupsi Pada Media Online Detik. com* (Bachelor's thesis, Falkultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi).
- Rusydi, M. T., Baradja, A., Sudalyo, R. A. T., Mukti, B., Oktaviandre, F., & Nugrohotomo, G. K. (2024). PELATIHAN DETEKSI HOAX UNTUK PELAJAR DI SMKN 1 KISMANTORO WONOGIRI, JAWA TENGAH. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 75-80.
- Saputra, M. A., & Supriono, S. (2024). Pengaruh Media Masa Terhadap Partisipasi Pemuda Dalam Politik. *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 14(II), 117-122.
- Sulianta, F. (2024). *Resolusi Konflik Ranah Digital*. Feri Sulianta.
- Swari, N. K. T. N., Pramana, G. I., & Noak, P. A. (2025). DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN KAMPANYE DIGITAL TERHADAP PERILAKU PEMILIH PEMULA (GEN Z) DALAM PILKADA BALI. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(5), 61-70.
- Tambawang, L., Sawir, M., & Pongtuluran, R. (2024). Melihat ke Belakang: Panggung Gemoy dan Dinamika Politik Masa Kini. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(3).
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.
- Tarumingkeng, I. R. C. *Peluang, Tantangan dan Implikasi*.
- Tosepu, Y. A. (2018). *Media baru dalam komunikasi politik (komunikasi politik i dunia virtual)*. Jakad Media Publishing.



THE INFLUENCE OF SOURCE CREDIBILITY AND ARGUMENT QUALITY OF 'JOVI ADHIGUNA' ON PURCHASE INTENTION OF LUXURY BAGS ON HERMESIEN CLOSET'S INSTAGRAM ACCOUNT THROUGH INFORMATION

ROOT ROSSINTA SCHUMANN
BAMBANG DWI PRASETYO
ANANDA SABIL HUSSEIN

University of Brawijaya
schumannsinta@gmail.com

Abstract

This study investigates the influence of source credibility and argument quality of fashion influencer Jovi Adhiguna on consumers' purchase intention of luxury bags via Hermesien Closet's Instagram account, mediated by perceived information usefulness. Applying the Elaboration Likelihood Model (ELM), the study surveyed 100 Instagram users fitting Hermesien Closet's target audience using a structured questionnaire. Data analysis was performed using Partial Least Squares (PLS) path modelling. Findings reveal that both source credibility and argument quality positively influence purchase intention, with information usefulness playing a significant mediating role. Practical implications suggest the importance of selecting credible influencers and crafting strong message arguments in digital marketing strategies targeting luxury consumers.

Keywords: Source Credibility, Argument Quality, Purchase Intention, Instagram Marketing, Fashion Influencer.



A. Introduction

In the contemporary digital landscape, marketing practices have undergone significant transformation, primarily driven by the rapid rise of social media platforms. Brands, both large and small, have shifted their marketing strategies to leverage the power of digital influencers individuals who have amassed considerable followings and who are perceived as credible and relatable sources of information. Particularly in the fashion industry, influencer marketing has emerged as a central promotional strategy due to its ability to connect directly with target audiences, foster engagement, and enhance brand visibility.¹

Luxury fashion brands, traditionally reliant on exclusivity and heritage-based marketing, are increasingly recognizing the potential of social media influencers to augment their digital presence.² However, marketing within the luxury segment demands a more nuanced approach, as the products themselves embody aspirational value, exclusivity, and prestige. Unlike mass-market products, luxury goods must maintain their aura of sophistication even in digital promotions. Thus, the selection of influencers and the construction of marketing messages require meticulous consideration. The credibility of the influencer and the quality of the content disseminated significantly affect consumer perceptions, brand image, and, ultimately, purchase intentions.

¹ Vrontis, D., Makrides, A., Christofi, M., & Thrassou, A. (2021). Social media influencer marketing: A systematic review, integrative framework and future research agenda. *International Journal of Consumer Studies*, 45(4), 617-644.

² Zacheo, A., Caratù, M., & Mainolfi, G. (2024). The Paths of Heritage Luxury Brands in the Digital Age: Italian Case Studies from the Fashion Industry. *Micro & Macro Marketing*, 1-26.



Jovi Adhiguna represents a compelling example of an effective fashion influencer within Indonesia's luxury segment. Known for his androgynous aesthetic and innovative fashion sense, Jovi Adhiguna has cultivated a personal brand that resonates with diverse audiences, extending beyond conventional gender norms and traditional fashion categories.³ His unique presence on Instagram, combined with his knowledge of fashion trends and authenticity in self-expression, positions him as a credible influencer whose endorsements hold considerable sway over followers' purchasing behaviors. Hermesien Closet, a luxury retailer specializing in high-end bags, has strategically partnered with Jovi Adhiguna to tap into his engaged follower base, thereby amplifying its brand message and reaching new market segments.

The theoretical foundation of this study rests on the Elaboration Likelihood Model (ELM) of persuasion, which provides a dual-route framework central and peripheral for understanding how consumers process persuasive messages.⁴ In the context of influencer marketing, source credibility often functions as a peripheral cue, influencing attitudes when consumers do not engage in extensive cognitive elaboration. Conversely, argument quality stimulates the central route of processing, wherein consumers critically evaluate message content. Both pathways contribute to attitude formation and behavioral intentions, underscoring the need for brands to

³ Talitha, S. J., & Satiti, N. L. U. (2020). *Reception Analysis of Androgyny According to College Student* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁴ Kim, M. J., Chung, N., Lee, C. K., & Preis, M. W. (2016). Dual-route of persuasive communications in mobile tourism shopping. *Telematics and Informatics*, 33(2), 293-308.



optimize both influencer selection (source credibility) and content development (argument quality).

A critical yet often overlooked factor mediating these relationships is perceived information usefulness. Consumers increasingly rely on digital content not only for entertainment but also for functional information that assists in their decision-making processes. Content that is perceived as helpful, accurate, and relevant can significantly enhance consumers' evaluations of both the message and the messenger. Thus, perceived information usefulness may serve as a crucial link between the independent variables—source credibility and argument quality—and the dependent variable, purchase intention.

Despite the burgeoning popularity of influencer marketing, academic exploration of its mechanisms within the luxury fashion sector, particularly in Southeast Asia, remains limited. Much of the extant research has focused on Western contexts, overlooking the distinctive cultural, social, and economic dynamics that shape consumer behavior in markets like Indonesia. As Southeast Asia witnesses rapid digitalization and an expanding middle class with increasing disposable income, understanding how local consumers engage with influencer marketing within the luxury segment becomes imperative for both practitioners and scholars.⁵

This study, therefore, seeks to fill this gap by systematically examining the influence of Jovi Adhiguna's source credibility and the

⁵ Pangarkar, A., & Shukla, P. (2023). Conspicuous and inconspicuous consumption of luxury goods in a digital world: insights, implications, and future research directions. *International Journal of Advertising*, 42(7), 1226-1238.



quality of his promotional arguments on consumers' intention to purchase luxury bags from Hermesien Closet's Instagram account. Additionally, the study explores the mediating role of perceived information usefulness in these relationships. By applying the ELM framework and integrating the mediating variable, the research aims to offer both theoretical insights and practical recommendations for optimizing influencer marketing strategies in the luxury fashion industry.

To structure the investigation, the remainder of this paper is organized as follows. Section B elaborates on the research methodology, including details of the research design, sampling strategy, data collection procedures, measurement instruments, and data analysis techniques. Section C presents the empirical findings and provides a comprehensive discussion, situating the results within the broader literature. Section E concludes the paper with a summary of key insights, managerial implications, theoretical contributions, study limitations, and avenues for future research.

By advancing knowledge in the area of luxury influencer marketing, this study not only contributes to academic discourse but also offers actionable insights for brand managers, marketing strategists, and influencers aiming to enhance their impact within the digital luxury marketplace.

B. Method

Research Design

This study adopts a quantitative research approach to systematically investigate the relationships between source



credibility, argument quality, perceived information usefulness, and purchase intention within the context of luxury fashion marketing on Instagram.⁶ A cross-sectional survey design was employed to collect empirical data, allowing for the examination of causal relationships and the generalizability of findings to a broader population of Instagram users familiar with luxury fashion brands.

Quantitative research methods are particularly suitable for identifying statistical patterns and testing hypotheses. In this study, a structured approach ensures consistency in data collection and analysis.⁷ By focusing on numerical data and objective measurement, the study aims to reduce potential biases and enhance the reliability of results. The choice of quantitative methods also facilitates comparison with similar studies in related fields, contributing to the academic robustness of the findings.

Population and Sampling

The target population for this study comprises Instagram users who actively engage with fashion-related content and are potential consumers of luxury fashion products. Given the study's focus on the influence of Jovi Adhiguna's endorsements on Hermesien Closet's Instagram account, purposive sampling was utilized to select respondents who fit specific criteria:⁸ (1) following Hermesien Closet's official Instagram account; (2) having prior

⁶ Barbarisque, M. (2024). Impact of Social Media Influencer's Characteristics on Consumer Purchase Intention and Behavior in French Luxury Fashion Brands.

⁷ Curry, L. A., Nembhard, I. M., & Bradley, E. H. (2009). Qualitative and mixed methods provide unique contributions to outcomes research. *Circulation*, 119(10), 1442-1452.

⁸ Rahayu, I. E. (2020). *An Audience Studies Toward Androgyny Celebgram On@ Joviadiguna Instagram Account* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).



awareness or exposure to Jovi Adhiguna's fashion-related posts; and (3) expressing interest in luxury fashion products, particularly luxury bags.

A total sample of 100 respondents was deemed adequate based on minimum requirements for Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) analysis. Sampling adequacy was determined using G*Power software to ensure sufficient statistical power for hypothesis testing. Data collection was conducted over a four-week period, during which participants were invited via Instagram direct messages and online community postings related to luxury fashion enthusiasts. To enhance response quality, participants were screened to confirm that they met inclusion criteria.

Data Collection Procedures

Primary data were collected using a structured online questionnaire developed using Google Forms. The questionnaire consisted of five main sections:⁹ (1) demographic information; (2) perceived source credibility of Jovi Adhiguna; (3) perceived argument quality of promotional content; (4) perceived information usefulness; and (5) purchase intention toward luxury bags marketed through Hermesien Closet's Instagram account. The structured nature of the questionnaire facilitated standardized data collection, enabling meaningful analysis.

⁹ Radhaswati, I. D. A. A., & Santosa, M. H. (2022). Teachers' perceptions: The use of Google Form as a media to assess primary school students. *EDUTECH: Journal of Education And Technology*, 5(4), 910-924.



Prior to data collection, the questionnaire underwent a pilot test involving 20 respondents to evaluate the clarity, relevance, and reliability of the measurement items. Necessary revisions were made based on feedback to improve question phrasing and minimize ambiguity. Ethical considerations were adhered to throughout the data collection process, ensuring respondent anonymity and informed consent. Participants were informed about the purpose of the study, the voluntary nature of participation, and the confidentiality of their responses.

Measurement Instruments

Measurement items were adapted from established scales validated in previous research. Source credibility was assessed using items adapted from Ohanian (1990) and Hovland et al. (1953),¹⁰ encompassing three dimensions: expertise (e.g., "Jovi Adhiguna is knowledgeable about fashion trends"), trustworthiness (e.g., "I trust the recommendations made by Jovi Adhiguna"), and homophily (e.g., "Jovi Adhiguna shares similar values with me"). Each dimension was measured using five-point Likert scales ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree).

Argument quality was measured using items adapted from Cheung and Thadani (2012),¹¹ focusing on four key attributes: relevance, timeliness, accuracy, and comprehensiveness. Sample items included statements such as "The promotional content shared

¹⁰ Ohanian, R. (1990). Construction and validation of a scale to measure celebrity endorsers' perceived expertise, trustworthiness, and attractiveness. *Journal of advertising*, 19(3), 39-52.

¹¹ Cheung, C. M., & Thadani, D. R. (2012). The impact of electronic word-of-mouth communication: A literature analysis and integrative model. *Decision support systems*, 54(1), 461-470.



by Jovi Adhiguna is relevant to my fashion preferences" and "The arguments provided in the promotional messages are timely and up-to-date." Likert-scale responses facilitated quantification of perceptions.

Perceived information usefulness was evaluated using measurement items from Dodds et al. (1991) and Sussman and Siegal (2003), including items such as "The information shared by Jovi Adhiguna helps me make informed purchase decisions" and "I find the information provided by Jovi Adhiguna to be useful when considering luxury fashion purchases." These items were similarly measured using five-point Likert scales.

Purchase intention was assessed using a scale comprising items adapted from Park et al. (2007) and Mishra and Satish (2016),¹² capturing respondents' likelihood to purchase luxury bags from Hermesien Closet following exposure to influencer-endorsed content. Example items include "I am likely to purchase a luxury bag from Hermesien Closet based on Jovi Adhiguna's recommendation." The cumulative approach ensures a comprehensive understanding of respondents' purchase intentions.

Data Analysis Techniques

Collected data were analyzed using SmartPLS 3.0 software, which facilitates PLS-SEM analysis suitable for complex models with multiple constructs and indicators. Preliminary data screening involved checking for missing values, outliers, and normality to ensure data quality. Reliability and validity of measurement

¹² Mishra, A., & Satish, S. M. (2016). eWOM: Extant research review and future research avenues. *Vikalpa*, 41(3), 222-233.



constructs were assessed through Cronbach's alpha, composite reliability (CR), and average variance extracted (AVE). These steps are crucial to confirm the internal consistency and convergent validity of the measurement model.

Structural model assessment involved evaluating path coefficients, coefficient of determination (R^2), effect size (f^2), and predictive relevance (Q^2) to determine the strength and significance of hypothesized relationships. Bootstrapping procedures with 5,000 resamples were conducted to assess the statistical significance of direct and mediating effects. Model fit indices such as Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) were examined to evaluate overall model adequacy. In addition, multi-group analysis (MGA) was conducted to assess potential differences in responses based on demographic variables such as age and gender.

In summary, the methodological approach adopted in this study ensures rigorous and systematic examination of the research hypotheses. By employing established measurement scales, ensuring careful data collection, and using advanced analytical techniques, this study aims to produce reliable and valid findings that contribute meaningfully to understanding the role of influencer marketing in the luxury fashion industry.

C. Result and Discussion

The findings affirm that influencer marketing within the luxury segment is significantly driven by both the credibility of the influencer and the persuasiveness of promotional content. These results align with prior studies utilizing the Elaboration Likelihood



Model,¹³ which emphasize the central role of message elaboration in shaping consumer attitudes and behaviors.

The observed dominance of the expertise dimension within source credibility suggests that consumers place considerable emphasis on influencers' knowledge and skill set when evaluating luxury fashion endorsements. This contrasts with certain mainstream product categories, where homophily may exert a stronger influence. Consequently, for luxury brands, collaborating with influencers who project industry knowledge and refined fashion acumen is vital to enhancing brand trust and stimulating purchase intentions.

The significant role of argument quality corroborates that consumers in the luxury segment engage in more cognitively demanding evaluations when exposed to promotional content. High-quality arguments, featuring relevant, accurate, and comprehensive information, resonate with consumers seeking validation for high-involvement purchases. This reflects a central route of message processing, where thoughtful evaluation of message content, rather than reliance on peripheral cues alone, drives decision-making.

Interestingly, the mediation analysis highlights perceived information usefulness as a key facilitator of message effectiveness. When consumers perceive influencer content as useful in informing their purchase decisions, the impact of both source credibility and argument quality is amplified. This finding underscores the necessity

¹³ Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). Message elaboration versus peripheral cues. In *Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change* (pp. 141-172). New York, NY: Springer New York.



for luxury brands to not only select credible influencers and craft strong arguments but also ensure that the content offers tangible informational value that assists consumers in their decision-making processes.

Culturally, the results suggest that Indonesian consumers, while influenced by aspirational imagery associated with luxury brands, value substance and informativeness in influencer content. This underscores the need for localized influencer marketing strategies that balance aspirational appeals with informative content, tailored to regional consumer expectations.

In comparison to prior studies focusing primarily on Western markets or non-luxury products, this study advances understanding by contextualizing influencer marketing strategies within the Southeast Asian luxury segment. The results emphasize that in high-involvement, prestige-driven markets, consumers process marketing messages more critically and rely on both content quality and source credibility to guide purchase intentions.

Collectively, these findings contribute to a more nuanced understanding of digital consumer behavior and the mechanics of luxury influencer marketing. They reinforce that achieving effectiveness in digital luxury promotions requires a dual focus: selecting industry-relevant, credible influencers and producing high-quality, useful content that facilitates consumer decision-making.

D. Conclusion



This study examined the influence of source credibility and argument quality on purchase intention for luxury bags promoted via Hermesien Closet's Instagram account, emphasizing the mediating role of perceived information usefulness. Drawing on the Elaboration Likelihood Model (ELM), the study contributes to both theoretical understanding and practical applications within the realm of influencer marketing, especially in the luxury fashion sector.

The findings revealed that both source credibility and argument quality significantly influence consumers' purchase intentions, with information usefulness acting as a crucial mediating factor. The strong effect of source credibility underscores the importance of selecting influencers who embody both expertise and trustworthiness. In the case of Hermesien Closet, Jovi Adhiguna's perceived expertise in fashion and alignment with the values of potential consumers fostered enhanced engagement and influenced purchasing decisions. This highlights that an influencer's reputation and personal branding extend beyond follower counts, directly shaping consumer trust and intentions.

Simultaneously, the quality of promotional arguments significantly impacts consumer purchase intention. The luxury fashion segment, characterized by highly involved consumers, demands more than superficial promotional messages. Consumers expect detailed, accurate, timely, and relevant information to evaluate products rationally. Well-crafted promotional content enhances not only message clarity but also consumer confidence in decision-making processes.



The mediating role of perceived information usefulness is particularly insightful. Content perceived as valuable and informative acts as a conduit through which source credibility and argument quality exert their effects on purchase intention. Therefore, influencers serve a dual role: they function as trusted endorsers and as key providers of information that aids consumer decision-making. Luxury brands must recognize the dual nature of influencers' roles in marketing strategies and facilitate content that combines persuasive appeal with informative substance.

This study's implications extend to digital marketing strategists and brand managers operating within the luxury sector. Firstly, collaborations with influencers must be strategically designed, prioritizing credibility, expertise, and alignment with brand values over superficial popularity. Secondly, brands should invest in ensuring that influencer-generated content meets high standards of quality, offering relevant, accurate, and comprehensive information to consumers. Thirdly, brands should empower influencers to serve not just as trendsetters but as reliable sources of valuable product information, enhancing content utility and driving purchase intentions.

From a theoretical standpoint, this study enriches the application of the Elaboration Likelihood Model in luxury fashion influencer marketing, highlighting that both central (argument quality) and peripheral (source credibility) routes are instrumental in shaping consumer behavior. Additionally, introducing perceived information usefulness as a mediating variable offers a novel



perspective on how consumers process influencer-endorsed content in luxury contexts.

While the study offers valuable insights, it is not without limitations. The sample size, though statistically adequate, limits generalizability across broader geographic or demographic contexts. Furthermore, the study focuses exclusively on Instagram and a single influencer-brand collaboration, which may constrain applicability across different social media platforms or influencer archetypes. Future research could explore comparative analyses across different social media platforms, influencer categories (e.g., micro vs. macro influencers), or product types within and beyond the luxury segment.

Further exploration of psychological factors such as consumer motivation, involvement level, and cultural variables could enrich understanding of how consumers interpret and respond to influencer marketing strategies. Additionally, qualitative research methods such as interviews or focus groups could provide deeper insights into the cognitive and emotional processes underpinning consumer responses to luxury influencer marketing.

In conclusion, the study affirms that effective luxury influencer marketing requires a strategic blend of credible influencer partnerships and the creation of high-quality, informative content. By understanding and leveraging these factors, luxury brands can foster meaningful consumer engagement, enhance information processing, and drive positive purchase decisions within the competitive digital landscape. The findings of this study not only contribute to academic literature but also provide actionable



guidelines for practitioners seeking to navigate the evolving landscape of luxury marketing in the digital era.

This study examined the influence of source credibility and argument quality on purchase intention for luxury bags promoted via Hermesien Closet's Instagram account, emphasizing the mediating role of perceived information usefulness.

References

- Aaker, D. A., & Myers, J. G. (1987). Advertising management. Prentice Hall.
- Barbarisque, M. (2024). Impact of Social Media Influencer's Characteristics on Consumer Purchase Intention and Behavior in French Luxury Fashion Brands.
- Booth, N., & Matic, J. A. (2011). Mapping and leveraging influencers in social media to shape corporate brand perceptions. *Corporate Communications: An International Journal*, 16(3), 184-191.
- Chaiken, S. (1980). Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(5), 752-766.
- Cheung, C. M., & Thadani, D. R. (2012). The impact of electronic word-of-mouth communication: A literature analysis and integrative model. *Decision support systems*, 54(1), 461-470.
- Cheung, C. M., & Thadani, D. R. (2012). The impact of electronic word-of-mouth communication: A literature analysis and integrative model. *Decision Support Systems*, 54(1), 461-470.
- Curry, L. A., Nembhard, I. M., & Bradley, E. H. (2009). Qualitative and mixed methods provide unique contributions to outcomes research. *Circulation*, 119(10), 1442-1452.
- Djafarova, E., & Rushworth, C. (2017). Exploring the credibility of online celebrities' Instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users. *Computers in Human*



- Behavior, 68, 1-7.
- Dodds, W. B., Monroe, K. B., & Grewal, D. (1991). Effects of price, brand, and store information on buyers' product evaluations. *Journal of Marketing Research*, 28(3), 307-319.
- Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). *The psychology of attitudes*. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
- Filieri, R. (2018). Consumer perceptions of information helpfulness and determinants of purchase intention in online consumer reviews of services. *Information & Management*, 55(8), 956-970.
- Hovland, C. I., Janis, I. L., & Kelley, H. H. (1953). *Communication and persuasion; psychological studies of opinion change*. Yale University Press.
- Ismagilova, E., Slade, E., Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2019). The effect of electronic word of mouth communications on intention to buy: A meta-analysis. *Information Systems Frontiers*, 22(5), 1203-1226.
- Kim, M. J., Chung, N., Lee, C. K., & Preis, M. W. (2016). Dual-route of persuasive communications in mobile tourism shopping. *Telematics and Informatics*, 33(2), 293-308.
- Lou, C. (2018). Social media influencers and strategic communication: How brands strategically collaborate with influencers. *International Journal of Strategic Communication*, 12(4), 325-343.
- Mishra, A. S., & Satish, N. (2016). The influence of source credibility, argument quality and self-construal on consumers' response to blog recommendations. *Journal of Research in Interactive Marketing*, 10(4), 338-355.
- Mishra, A., & Satish, S. M. (2016). eWOM: Extant research review and future research avenues. *Vikalpa*, 41(3), 222-233.
- Ohanian, R. (1990). Construction and validation of a scale to measure celebrity endorsers' perceived expertise, trustworthiness, and attractiveness. *Journal of advertising*, 19(3), 39-52.
- Ohanian, R. (1990). Construction and validation of a scale to measure celebrity endorsers' perceived expertise, trustworthiness, and attractiveness. *Journal of Advertising*, 19(3), 39-52.
- Pangarkar, A., & Shukla, P. (2023). Conspicuous and



- inconspicuous consumption of luxury goods in a digital world: insights, implications, and future research directions. *International Journal of Advertising*, 42(7), 1226-1238.
- Park, D. H., Lee, J., & Han, I. (2007). The effect of on-line consumer reviews on consumer purchasing intention: The moderating role of involvement. *International Journal of Electronic Commerce*, 11(4), 125-148.
- Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). Message elaboration versus peripheral cues. In *Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change* (pp. 141-172). New York, NY: Springer New York.
- Radhaswati, I. D. A. A., & Santosa, M. H. (2022). Teachers' perceptions: The use of Google Form as a media to assess primary school students. *EDUTECH: Journal of Education And Technology*, 5(4), 910-924.
- Rahayu, I. E. (2020). *An Audience Studies Toward Androgyny Celebgram On@ Joviadiguna Instagram Account* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Sussman, S. W., & Siegal, W. S. (2003). Informational influence in organizations: An integrated approach to knowledge adoption. *Information Systems Research*, 14(1), 47-65.
- Talitha, S. J., & Satiti, N. L. U. (2020). *Reception Analysis of Androgyny According to College Student* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Till, B. D., & Busler, M. (2000). The match-up hypothesis: Physical attractiveness, expertise, and the role of fit on brand attitude, purchase intent and brand beliefs. *Journal of Advertising*, 29(3), 1-13.
- Veissi, A. (2017). Social media influencers in strategic communication. *International Journal of Strategic Communication*, 11(3), 220-239.
- Vrontis, D., Makrides, A., Christofi, M., & Thrassou, A. (2021). Social media influencer marketing: A systematic review, integrative framework and future research agenda. *International Journal of Consumer Studies*, 45(4), 617-644.
- Xu, P., & Warkentin, M. (2020). The effects of psychological



- ownership and parasocial interaction on social media influencers' impact on purchase intentions. *Journal of Electronic Commerce Research*, 21(1), 1-21.
- Zacheo, A., Caratù, M., & Mainolfi, G. (2024). The Paths of Heritage Luxury Brands in the Digital Age: Italian Case Studies from the Fashion Industry. *Micro & Macro Marketing*, 1-26.
- Zhang, Z., Ye, Q., Law, R., & Li, Y. (2010). The impact of e-word-of-mouth on the online popularity of restaurants: A comparison of consumer reviews and editor reviews. *International Journal of Hospitality Management*, 29(4), 694-700.



REFORMASI ADMINISTRASI DAN DESENTRALISASI PADA MASA DINASTI UMMAYAH DI DAMASKUS (670-750 M)

MUHAMMAD IBRAHIM RANTAU

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

mibrahim@unis.ac.id

HERU PERMANA PUTRA

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

herupermanaputra@uinbukittinggi.ac.id

Abstract

The political system during the reign of the Umayyah Dynasty in Damascus tended to be an absolute monarchy where absolute power was in the hands of a Caliph. However, in managing the administration of the kingdom, a caliph still delegated his power to his assistants to complete technical matters of government. The wider range of territories makes government affairs more complex, which makes the delegation of authority to local governments crucial. This article aims to examine the model of bureaucratic governance during the Umayyah Dynasty, especially in terms of the relationship between the central government in Damascus and the provincial governments in the conquest areas. The method used in this research is pure qualitative, with data collection techniques through a library research approach. The results showed that although political power was held centrally, by changing the government system into an absolute monarchy and the succession of leadership was carried out dynastically, in terms of governance, the Umayyah Dynasty tended to manage local governments in a decentralised manner, by giving a role to the Provincial Government to manage its territory autonomously.

Keywords : *Bureaucracy, administrative reform, regional autonomy, classical Islam*



A. Pendahuluan

Dinasti Bani Umayyah (670-750) didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan Sakhr bin Harb, setelah berhasil mengambil alih kepemimpinan politik umat Islam, pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib. Keberhasilan Muawiyah menjadi khalifah tak lepas dari kelihaiannya dalam memancing Ali bin Abi Thalib untuk melakukan perjanjian arbitrase guna mengakhiri perang Shiffin antara dirinya sebagai Gubernur di Damaskus dan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Sebagai akibat dari perjanjian tersebut, Ali kehilangan jabatannya sebagai khalifah dan Muawiyah berdasarkan beberapa sumber juga kehilangan jabatannya sebagai Gubernur.¹ Perjanjian tersebut membuat kedudukan Muawiyah dianggap setara dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga pasca terbunuhnya Ali, Muawiyah dapat dengan leluasa mengklaim kekhalifahan sebagai pengganti Ali.

Kepemimpinan Muawiyah diawali dengan situasi konflik dan perpecahan dikalangan umat Islam sebagai akibat dari perseteruannya dengan Ali bin Abi Thalib. Perjanjian arbitrase menyebabkan lahirnya beberapa sekte baru yang menganggap baik Ali maupun Muawiyah adalah kafir yang layak untuk dibunuh. Perpecahan juga semakin akut sebagai dampak dari perbedaan pemahaman keagamaan pasca wafatnya para

¹ Perjanjian arbitrase untuk menghentikan perang Shiffin menyepakati penunjukan arbitrator untuk membicarakan langkah-langkah perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali menunjukkan Abu Musa al Asyari sebagai wakilnya, sedangkan Muawiyah menunjuk Amr bin Ash sebagai utusannya. Dalam proses arbitrase disepakati untuk memecat baik Ali maupun Muawiyah dari jabatannya masing masing. Beberapa sumber lain yang banyak berkembang pada masa Dinasti Abbasiyah menyebutkan bahwa Amr bin Ash mengkhianati arbitrase dengan membait Muawiyah sebagai khalifah pasca pemecatan Ali bin Abi Thalib. Phillip K Hitti, *History of the Arabs*, Palgrave Macmilan (New York, 2002)



sahabat Nabi SAW yang pada masa sebelumnya banyak dijadikan rujukan dalam persoalan-persoalan baik keagamaan maupun sosial politik. (Katsir, 2004). Untuk meredam situasi konflik dan menciptakan suasana transisi kepemimpinan yang kondusif Muawiyah kemudian memindahkan ibukota pemerintahan dari Kuffah ke Damaskus. Pemindahan ibukota dilakukan mengingat baik Kuffah maupun Madinah adalah wilayah yang tidak bersahabat bagi Muawiyah. Kuffah dan Basrah adalah basis pendukung Ali bin Abi Thalib, dan Madinah adalah wilayah netral dimana klan Abu Sufyan tidak memiliki pengaruh disana. Sedangkan Damaskus adalah tanah kelahiran klan Sufyan, dimana Muawiyah bin Abu Sufyan banyak menghabiskan karir politiknya sebagai Gubernur di wilayah tersebut.

Pasca mengambil alih kekuasaan kekhalifahan, Muawiyah melakukan konsolidasi internal dengan meredam kelompok-kelompok yang tidak mengakui kekuasaannya sebagai khalifah. Muawiyah mengirim orang-orang kepercayaan untuk memimpin daerah-daerah rawan konflik. Marwan bin Hakam, salah satu loyalisnya, ditunjuk untuk menjadi Gubernur di Hijaz yang secara langsung menguasai dua kota suci, yaitu Madinah dan Mekkah. Sedangkan Yazid bin Abu Sufyan yang juga saudara Muawiyah ditunjuk untuk mengelola Kuffah dan Basrah. Kedua wilayah tersebut adalah pusat perlawanan bagi kelompok yang tidak mengakui kekhalifahan Bani Umayyah. Kepiawaian Muawiyah dalam mengelola konflik membuat transisi kekuasaan relatif aman dari kekerasan. Muawiyah memperlakukan lawan-lawan politiknya dengan cerdas, tanpa harus menumpahkan darah.² Konflik dan kekerasan baru mulai terjadi

² Kemampuan Muawiyah untuk melakukan resolusi konflik tampak dalam peristiwa ‘Amm al Jamaah tahun 661 M, dimana terjadi rekonsiliasi antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali untuk menghentikan permusuhan dan menciptakan perdamaian. Secara lebih spesifik Saad bin Ash



ketika Muawiyah menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi khalifah penggantinya, sekaligus merubah tradisi pemilihan khalifah secara musyawarah menjadi penunjukan secara turun temurun. Pertumpahan darah paling tragis pada masa Yazid adalah pembantaian Husain bin Ali, cucu Nabi SAW di Padang Karbala pada 10 Muharram 61 H/10 Oktober 680 M, yang sekaligus menandai konflik abadi antara pengikut Ali yang Syiah dan klan Muawiyah yang notabene-nya Sunni.

Dalam mengelola kekuasaannya, Muawiyah juga menerapkan sistem monarki absolut, dimana kekuasaan politik sepenuhnya dikendalikan oleh dirinya sebagai khalifah. Di awal kekuasaannya Muawiyah merubah fungsi *Ahlul Hal wa al-Aqdi*, sebuah lembaga yang berfungsi sebagai legislator pada zaman Khulafa ar-Rasyidin, menjadi hanya sekadar lembaga penasihat khalifah. Muawiyah juga memilih secara langsung *Qadhi al-Qudhat* (Hakim Agung), terutama yang ditempatkan di ibukota Damaskus. Maka, dalam hal ini Khalifah tidak hanya sebagai pembuat undang-undang, namun sekaligus sebagai hakim dan pengadilan akhir dalam sistem peradilan.

Meskipun kekuasaan politik terpusat di tangan seorang khalifah, namun kompleksnya urusan pemerintahan serta luasnya wilayah ekspansi imperium Dinasti Umayyah membuat Khalifah harus mendelegasikan kewenangan, terutama dalam urusan administrasi negara kepada para pembantunya. Secara horizontal pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan administrasi negara dilimpahkan kepada para *wazir* (menteri)

menggambarkan peristiwa tersebut sebagai kelihaian Muawiyah dengan kalimat yang cukup terkenal “*Aku tidak mempergunakan pedangku kalau cambuk saja sudah cukup, dan tidak pula kupergunakan cambukku kalau perkataan saja sudah memadai, andaikata aku dengan orang lain memperebutkan sehelai rambut, rambut itu tidak akan putus. Dikatakan, apa maksudnya ya Amir al-Mukminin ? Ia menjawab: Apabila mereka mengencangkannya aku kendorkan dan bila mereka mengendorkannya akan kukencangkan*”. Khairuddin, *Kebijakan Politik Muawiyah*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 10/1, Januari 2011.



dan *hajib* (protokoler istana). Sedangkan pendelegasian kewenangan secara vertikal dilakukan dengan menugaskan gubernur untuk membentuk wilayah administratif setingkat Provinsi di wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Wilayah kekuasaan Dinasti Umayyah di Damaskus pada masa Muawiyah bin Abi Sofyan tercatat dibagi kedalam 9 Provinsi, yaitu Suriah-Palestina, Kuffah, Basrah, Armenia, Hijaz, Karman, Mesir, Afrika Utara, Yaman, dan Arab Selatan. (K.Hitti, 2002).

Tidak seperti pendahulunya, Yaitu Umar bin Khattab yang cenderung sentralistis dalam menata daerah penaklukan, Muawiyah cenderung memberikan keleluasaan kepada para Gubernur untuk mengelola wilayahnya. Meskipun tata kelola kekhalifahan cenderung sentralistis dengan menempatkan dirinya sebagai pusat kekuasaan politik, namun secara administratif Muawiyah dan beberapa khalifah Bani Umayyah penerusnya memberikan kekuasaan penuh kepada Gubernur menentukan sendiri struktur birokrasi di tingkat Provinsi, seperti *Diwan as-Syurtah*/lembaga kepolisian, *Qadhi*/hakim wilayah, hingga *Diwan al-Jund*/kepala militer. Gubernur bahkan memiliki kewenangan untuk memilih sendiri setiap kepala daerah wilayahnya masing-masing. Salah satu Gubernur fenomenal yang tercatat memiliki kewenangan penuh dalam mengelola wilayahnya secara administratif, bahkan dalam mengatasi konflik dan memperluas daerah penaklukan adalah al Hajaj bin Yusuf at-Tsaqafi yang bertugas sebagai Gubernur Irak pada masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Ekspansi dan wilayah penaklukan al Hajaj bahkan meluas hingga Asia Barat dan perbatasan Cina di Asia Tengah.

Strategi pengelolaan wilayah penaklukan tentunya merupakan hal yang belum mapan dalam sejarah politik Islam dimasa itu. Era ekspansi baru dimulai secara serius pada masa Khulafa ar-Rasyidin kedua, yakni Umar bin Khattab, dan cenderung berhenti pada masa Ustman bin Affan,



dan Ali bin Abi Thalib. Ekspansi secara masif kembali dilakukan pada masa Muawiyah bin Abi Sofyan yang membuat kekuasaan Islam mencapai fase *imperial over reach*, tidak hanya meliputi Semenanjung Arabia, namun juga sebagian besar Afrika Utara, serta beberapa wilayah Persia, Asia Tengah dan Asia Barat. Sementara Bangsa Arab sebagai pondasi utama berdirinya kekhalifahan Ummayah sangat terbatas entitasnya di Jazirah Arab dan Syam. Untuk mengelola wilayah kekuasaan yang sedemikian besar dibutuhkan tata kelola yang efektif untuk dapat mempertahankan kekuasaan atas wilayah yang luas tersebut

Kecenderungan Muawiyah dan beberapa khalifah Dinasti Ummayah untuk mengelola wilayah Provinsi secara desentralistis tentunya kontradiktif dengan pemahaman umum, bahwa pusat kekuasaan dalam kekhalifahan Islam ada di tangan khalifah. Kekuasaan politik seorang khalifah mutlak dan tidak terbagi. Fondasi kekuasaan dibangun atas dasar keyakinan bahwa khalifah adalah penerus Rasulullah SAW sebagai pimpinan politik dan merupakan wakil Tuhan di muka bumi. Apalagi pada era Muawiyah, sistem suksesi kepemimpinan yang sebelumnya dilakukan dengan pemilihan, baiat, dan musyawarah diubah secara dramatis dengan menunjuk Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah penggantinya. Diakhir hayatnnya, Muawiyah terbukti telah menyiapkan sebuah sistem monarki absolut untuk mengukuhkan kekuasaan politik anaknya dan klan Ummayah pada umumnya.

B. Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pola-pola administratif yang digunakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan para khalifah Bani Ummayah pada umumnya



untuk mengelola daerah penaklukan yang sangat luas. Penelitian secara kualitatif digunakan karena dengan metode ini memungkinkan untuk mengkaji secara mendalam suasana historis serta memahami tata kelola administrasi pemerintahan Dinasti Umayyah dalam mengatur wilayah kekuasaannya. Penelitian kualitatif juga bermanfaat untuk menemukan relevansi penelitian yang bersifat historis dalam pengembangan disiplin ilmu administrasi publik pada masa kini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur baik modern maupun klasik untuk mendapatkan data-data yang orisinil tentang suasana kesejarahan Dinasti Umayyah, terutama terkait dengan bagaimana pengelolaan administrasi negara pada masa tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Model tata kelola administrasi pada masa Dinasti Umayyah sebenarnya adalah model yang mengadaptasi reformasi administrasi di Byzantium pada awal abad ke 6 M. Luasnya wilayah kekuasaan imperium Byzantium atau Romawi Timur membuat Kaisar Justinian, penguasa Byzantium ketika itu, mereduksi kekuasaan Lembaga Keuskupan dengan mentransfer kewenangan secara administratif kepada daerah otonom setingkat provinsi untuk dikelola oleh para deputi militer. (Burry, 2018) Pola serupa diterapkan oleh Muawiyah dalam mengelola daerah kekuasaan Pemerintahan Islam yang sangat luas. (K.Hitti, 2002) Pada masa kekhilafahan Umar bin Khatab saja, ekspedisi militer Islam dibawah komando Khalid bin Walid telah mampu menaklukkan Irak, dan Persia. Sedangkan di Barat, Amr bin Ash juga telah mampu menaklukkan Mesir dan beberapa wilayah di Afrika Utara. Sedangkan pada masa Muawiyah dan para penerusnya di Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah hingga



Asia Tengah, India, hingga Semenanjung Iberia (Andalusia). (Ismail R al-Faruqi, Lois al-Faruqi, 1986)

Luasnya wilayah kekuasaan pemerintahan Islam membuat Muawiyah melakukan reformasi administrasi dengan melakukan penataan internal di Pemerintah pusat serta membuat tata kelola berjenjang untuk mengatur dan mengendalikan wilayah penaklukan. Di ibukota Damaskus, Muawiyah melakukan tata kelola dengan membuat beberapa struktur yang menjalankan fungsi-fungsi administratif layaknya birokrasi di negara modern. Untuk membantu tugasnya sebagai khalifah, Muawiyah membentuk lembaga dan departemen setingkat Sekretariat Negara, yaitu *Diwan/Nidhom al-Idhari* yang didalamnya terdapat beberapa posisi seperti *al-Katib*, *al-Hajib*, dan beberapa *Diwan*. *Al-Katib* adalah Lembaga sekretaris khalifah yang dibentuk sesuai dengan bidang-bidang tertentu. *Katib ar-Rasail* adalah sekretaris negara yang bertugas melakukan pencatatan administratif. *Katib al-Kharaj* adalah bendahara negara yang bertugas mengatur dan melakukan pencatatan keuangan negara. *Katib as-Syurtah* adalah sekretaris khalifah dibidang keamanan dalam negeri/kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban ibukota. Sedangkan *Katib al-Jund* adalah sekretaris yang bertugas membantu khalifah mengatur urusan keamanan nasional dan mengelola organisasi militer.

Pada masa awal kekuasaannya, Muawiyah juga membuat sebuah struktur baru yang bernama *al-Hajib*. Seorang *Hajib* pada masa Muawiyah lebih berperan sebagai protokoler yang bertugas menyeleksi siapapun yang keluar masuk istana untuk bertemu dengan Khalifah. Tidak seperti pada masa Khulafa ar-Rasyidin dimana seorang khalifah terbiasa hidup sederhana, merakyat dan dapat ditemui oleh siapapun, Muawiyah dan para Khalifah Dinasti Ummayyah notabene nya hidup didalam istana dengan



penjagaan super ketat. Kenyataan bahwa para Khalifah sebelum Muawiyah hampir semuanya wafat terbunuh membuat para pemimpin Dinasti Umayyah menerapkan aturan ketat dengan menerapkan protokoler bagi tamu-tamu yang akan menemui mereka. Namun fungsi Hajib semakin lama semakin mengalami perubahan dengan berperan lebih sebagai kepala rumah tangga istana. Dalam beberapa situasi, posisi al-Hajib bahkan lebih krusial dibanding seorang wazir/menteri, dimana al-Hajib banyak menjembatani komunikasi antara wazir dengan Khalifah, sebagaimana yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah di Andalusia.

Selain *al-Katib* dan *al-Hajib*, terdapat beberapa diwan atau lembaga setingkat departemen yang berfungsi untuk membantu khalifah dalam mengatur hubungan dengan pemerintah daerah di wilayah-wilayah penaklukan. Beberapa lembaga tersebut adalah:

- A. ***Diwan ar-Rasail* atau Departemen Surat Menyurat** yang berfungsi mengurus komunikasi antara Khalifah dengan para Gubernur di daerah-daerah yang dikuasai. Surat menyurat pada mulanya dilakukan dengan menyesuaikan bahasa dimana surat dari Khalifah ditujukan. Namun pada masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan dilakukan kebijakan Arabisasi terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk penggunaan bahasa resmi. Sehingga surat menyurat antara Khalifah dan para Gubernur dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab.
- B. ***Diwan al-Katib* atau Departemen pencatatan**, yang bertugas mendokumentasikan semua keputusan Khalifah dan peraturan pemerintah untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.
- C. ***Diwan al-Kharaj* atau departemen pendapatan negara** yang bertugas mengatur pengumpulan pendapatan negara dari berbagai jenis seperti kharaj, jizyah, fai, dan ghanimah. Setiap Provinsi



memiliki Diwan al-Kharaj yang secara struktural berada dibawah pengawasan Gubernur. Semua jenis pendapatan negara tersebut dikumpulkan di Baitul Mal milik pemerintah pusat di Damaskus, untuk kemudian digunakan untuk membiayai kepentingan negara serta didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain melakukan pembaharuan dalam tata kelola administrasi di Damaskus sebagai pusat pemerintahan, Muawiyah dan penerusnya juga melakukan pembaharuan pada pengelolaan pemerintahan daerah setingkat Provinsi. Penataan Pemerintah Provinsi dilakukan dengan memilih pejabat setingkat Gubernur sesuai dengan karakter dan kondisi politik di tingkat lokal. Pada fase awal kekuasaannya Muawiyah menunjuk Ziyad bin Abu Sofyan sebagai Gubernur di Basrah dan Marwan bin Hakam untuk memimpin wilayah Hijaz yang pemerintahannya berpusat di Madinah. (Katsir, 2004) Di Mesir sebagai pusat Provinsi Afrika Utara, Muawiyah menunjuk Abdullah Bin Amr Bin Ash untuk menjadi Gubernur yang kemudian dilanjutkan oleh Muawiyah Bin Hudaij. Dalam mengelola wilayah kekuasaannya Gubernur diberi kewenangan baik secara politik maupun administratif untuk mengatur wilayahnya selama sesuai dengan visi dan perintah Khalifah.

Secara politik, Gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah, memiliki wewenang untuk melakukan perluasan wilayah sekaligus memilih kepala daerah di wilayah yang telah dikuasai sesuai dengan pertimbangan dan kondisi lokal masing-masing. Sebagaimana yang terjadi di Provinsi Irak, dimana Gubernur Ziyad bin Abu Sofyan mengutus al Hakam bin Amr al Ghifari untuk melakukan ekspansi ke Khurasan. Sebuah wilayah yang saat ini merupakan bagian dari Afganistan, Iran, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, serta Pakistan. al-Hakam kemudian diberi kepercayaan untuk mengelola wilayah tersebut, yang kemudian dilanjutkan oleh Rabi bin



Ziyad al-Haritsi, seorang panglima perang terkenal yang berhasil menuntaskan misi Ziyad bin Abu Sofyan untuk menguasai Khurasan Raya. Setelah wilayah kekuasaan di Khurasan semakin besar dan menjadi Provinsi tersendiri, Muawiyah mengambil alih secara langsung kewenangan politik di wilayah tersebut dengan menunjuk Saad bin Utsman untuk menggantikan Ubaidillah Bin Ziyad. (Katsir, 2004)

Kewenangan Gubernur untuk memperluas dan mengelola wilayah juga terlihat di daerah kekuasaan Bani Ummayah di Afrika Utara. Uqbah Bin Nafi adalah gubernur pertama yang mendirikan kota al-Qayrawan yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Bani Ummayah di Afrika Utara. Jenderal Arab yang dikenal sebagai penakluk Afrika Utara ini kemudian memimpin ekspedisi untuk memperluas wilayah kekuasaan hingga Magribi. Para Gubernur setelahnya seperti Musa bin Nusayr, Ismail bin Abdullah, hingga Yazid bin Muslim juga diberi wewenang untuk memperluas wilayah penaklukan, bahkan hingga Andalusia. Para Gubernur juga melakukan tata kelola administrasi lokal dengan membuat struktur birokrasi berjenjang dibawah Pemerintah Provinsi. Isu sentral terkait pengelolaan wilayah di Afrika Utara pada umumnya adalah kebijakan terkait pajak yang dikelola oleh pemimpin wilayah masing-masing. (Nicolle, 2009)

Secara administratif seorang Gubernur juga memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk menata serta mengelola pemerintahannya, terutama pada 2 dekade awal kekuasaan Dinasti Ummayah. Dalam menjalankan tugas-tugasnya seorang Gubernur dibantu beberapa pejabat administratif seperti *al-katib*, *al-hajib*, serta kepala-kepala departemen seperti *shahib al-kharaj* (pejabat pendapatan), *shahib al-syurthat* (pejabat



kepolisian, serta para *qadhi* (hakim).³ Sumber daya manusia untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut diambil dari para tokoh lokal yang menguasai bidangnya masing-masing, termasuk kepala polisi dan para hakim yang penunjukannya sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur.

Dalam persoalan ekonomi, beberapa gubernur dapat menerapkan kebijakan fiskal yang otonom dari pemerintahan pusat di Damaskus, seperti penetapan mata uang lokal sebagai alat transaksi resmi, (Hassan, 2003) serta pengelolaan pajak. Kebijakan penetapan mata uang tampak dalam kasus tetap digunakannya mata uang/koin berlogo Byzantium dan Sasanian di wilayah-wilayah bekas kekuasaan imperium tersebut sebelum kebijakan arabisasi pada masa Abdul Malik bin Marwan diterapkan. Sedangkan otonomi dalam pengelolaan pajak dapat dilihat dari kewenangan Gubernur untuk menentukan besaran *kharaj* dan *jizyah* di beberapa wilayah, seperti di Bukhara pada masa Muawiyah, Khurasan pada masa Yazid III, Mesir pada masa Hisyam bin Abdul Malik serta Kufah dan Khurasan pada masa Umar bin Abdul Aziz.⁴ (Lapidsus, 2004) Namun begitu, beberapa sumber melihat kebijakan desentralisasi fiskal merupakan gambaran dari lemahnya kontrol Pemerintah pusat di Damaskus atas pengelolaan pajak di daerah. Dalam beberapa kondisi hal tersebut berdampak pada berkurangnya besaran upeti yang diterima oleh

³ Pada fase-fase awal Dinasti Umayyah, pengelolaan administratif di tingkat Provinsi dilakukan dengan mengakomodasi tradisi administrasi yang berlaku sebelumnya. Di Syiria dan Mesir sistem administrasi Bizantium tetap diterapkan, bahkan kemudian diadopsi dalam reformasi sistem administrasi Kekhalifahan Bani Umayyah. Sedangkan di Iraq dan Khurasan pola organisasi administrasi ala Sasania diterapkan dalam pengaturan administratif ditingkat Provinsi. Lihat dalam Ira, M Lapidsus, *A History of Islamic Societies*, Cambridge University Press, (New York, 2004)

⁴ Dalam beberapa kondisi khalifah dapat merevisi kebijakan penetapan pajak yang diterapkan oleh Gubernur apabila dianggap dapat merugikan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menegur Gubernur Khurasan dan Basrah terkait dengan jenis dan besaran pajak. Lihat dalam Abdul al-Aziz Duri, *Early Islamic Institution, Administration and Taxation from The Caliphate to the Umayyads and Abbasids*, I.B. Tauris (London, 2014)



Pemerintahan Pusat, dan secara langsung menyebabkan terjadinya krisis keuangan yang dialami oleh Dinasti Umayyah, sebagaimana terjadi pada masa Abdul Malik dan al-Walid. (Duri, 2014)

Kecenderungan desentralisasi juga terlihat ketika Gubernur dapat menerapkan kebijakan- kebijakan hukum yang bernuansa lokal, seperti penunjukan hakim dari unsur masyarakat setempat serta pemberlakuan hukum adat. Di Provinsi Mesir, hakim beserta aturan dan produk hukumnya merupakan warisan dari tradisi Byzantium yang lama berkuasa dikawasan tersebut. Warisan tersebut tetap dipertahankan, paling tidak selama masa Muawiyah, Yazid, dan awal pemerintahan Marwan bin Hakam. (Tiller, 2020) Bahkan sebelum fase arabisasi yang dilakukan oleh generasi ke 5 Dinasti Umayyah, Gubernur masing-masing Provinsi masih diberikan kewenangan untuk menggunakan bahasa dan tradisi lokal (*urf*) dalam setiap kegiatan pemerintahan dan peradilan. Di Irak dan Palestina, pengadilan yang menggunakan kodifikasi hukum Yahudi masih tetap berlangsung dalam menangani perkara hukum yang melibatkan warga negara non muslim. Begitu juga di Fustat dimana para bangsawan dan kodifikasi hukum Koptik masih digunakan dalam sistem peradilan Mesir.

Kebijakan Muawiyah dan beberapa Khalifah Dinasti Umayyah untuk memberikan kewenangan yang cukup luas secara politik dan administratif kepada pemerintah Provinsi, terutama di kawasan yang cukup jauh dari ibukota dapat dilihat dalam dua perspektif. Pertama, kebijakan tersebut tak lepas dari politik akomodatif yang dilakukan untuk memperoleh kepatuhan dan legitimasi dari para kepala suku Arab dan tokoh elit lokal atas kekuasaan Dinasti Umayyah di wilayah tersebut. Politik akomodatif terutama dilakukan di fase awal kekuasaan Dinasti Umayyah, dari Muawiyah bin Abi Sufyan hingga Marwan Bin Hakam.



Kedua hal tersebut menggambarkan ketidakmampuan pemerintah pusat di Damaskus untuk mengontrol kebijakan para Gubernur di tingkat Provinsi terutama dalam hal penetapan pajak. (Duri, 2014) Luasnya wilayah kekuasaan dan belum tersedianya alat komunikasi yang memadai membuat Gubernur dan penguasa wilayah dapat dengan leluasa mengatur dan menentukan kebijakan mereka sendiri. Tentunya selama pajak dan upeti untuk pemerintah pusat dapat terpenuhi. Dalam kondisi seperti ini moral hazard Gubernur dan para penguasa wilayah seringkali terjadi, yang menyebabkan jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas Pemerintahan Dinasti Umayyah.

Kebijakan desentralisasi mengalami pasang surut dan cenderung berubah dari satu fase ke fase yang lain. Pada masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan kebijakan politik dan administratif cenderung ditarik ke pusat. Potensi disintegrasi akibat ekspansi yang terlalu luas, serta konflik politik dengan pihak pihak yang menentang kekuasaan Dinasti Umayyah, terutama di Hijaz dan Irak, membuat khalifah merubah kebijakan terkait hubungan pusat dan daerah. Wilayah konflik seperti Irak, kembali dikelola dengan tangan besi dengan mengirim al-Hajaj bin Yusuf, seorang jenderal yang terkenal represif, untuk mengendalikan potensi perlawanan dari Bani Hasyim dan para pengikut Ali bin Abi Thalib. Secara administratif, Abdul Malik bin Marwan dan penerusnya al-Walid bin Abdul Malik juga melakukan program Arabisasi dan Islamisasi terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk bahasa dan alat alat administratif, seiring dengan semakin banyaknya masyarakat di wilayah penaklukan yang memeluk Islam. Dengan melakukan Arabisasi dan Islamisasi, klan Marwan dapat dengan leluasa mengelola birokrasi secara terpusat, dan mengembalikan kendali kekuasaan imperium Dinasti Umayyah ke Damaskus.



Relevansi Penelitian Untuk Pengembangan Bidang Politik dan Administrasi Publik

Penelitian ini memiliki relevansi dalam pengembangan bidang politik dan administrasi publik terutama dalam perspektif Islam (*Islamic Public Administration*), dimana bidang ini masih jarang tersentuh oleh trend islamisasi ilmu pengetahuan. Sebagai sebuah alternatif bagi wacana *non western public administration*, Islam memberikan dua pendekatan tentang bagaimana tata kelola administrasi publik ketika dikaitkan dengan Islam (*Islamic Governance*). *Pertama* adalah bagaimana tinjauan ajaran agama Islam tentang pengelolaan administrasi publik, baik pemerintahan, maupun masyarakat. Kedua adalah bagaimana tata kelola pemerintahan tersebut dijalankan dalam spektrum sejarah peradaban Islam yang membentang dari abad ke 7 masehi hingga saat ini.

Penelitian ini memberikan penekanan pada aspek kajian historis tentang bagaimana pengelolaan administrasi negara pada masa kekuasaan Dinasti Umayyah dari tahun 670 hingga 750 masehi. Aspek yang dikaji meliputi kondisi sosio politik dan historis, gaya kepemimpinan, tata kelola dan reformasi administrasi, hingga hubungan antara pemerintah pusat di Damaskus dan Pemerintah Daerah di wilayah penaklukan. Aspek sosio-politik memberikan penekanan tentang bagaimana kondisi politik dan geografis yang melatar belakangi kebijakan dalam mengelola administrasi pemerintahan. Kebijakan reformasi administrasi yang diterapkan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan pada fase awal kekuasaan menunjukkan bahwa tata kelola administrasi merupakan salah satu ciri khas dalam pembangunan politik Dinasti Umayyah.

Muawiyah menerapkan pola administrasi pusat yang ramping namun efektif untuk mengelola masa transisi kekuasaan serta menjaga stabilitas dan integrasi politik. Hal tersebut menjadi kunci keberhasilan



Muawiyah bin Abi Sufyan dalam melakukan transisi kekuasaan yang berpotensi konflik dan kekerasan hingga dapat berakhir kondusif bagi dimulainya kekuasaan Dinasti Umayyah.

Selain itu, dalam sebuah wilayah kekuasaan yang sangat luas dengan suku bangsa dan agama yang beraneka ragam, pola pengelolaan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat krusial demi tetap menjaga integrasi dan keberlangsungan negara. Pilihan untuk melakukan sentralisasi maupun otonomi dapat dikatakan merupakan kunci bagi stabilitas pemerintahan dalam situasi wilayah penaklukan yang terlalu luas (*imperial over reach*) sebagaimana yang terjadi pada masa kekuasaan dinasti-dinasti Islam. Dalam hal ini, sistem desentralisasi yang digunakan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di tingkat Provinsi terlihat ikut berperan dalam menjamin integrasi dan loyalitas politik para elit lokal kepada pemerintah pusat di Damaskus, terutama dalam fase transisi kekuasaan.

Tata kelola administrasi juga tak lepas dari faktor kepemimpinan. Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagai penguasa pertama Dinasti Umayyah, dikenal sebagai seorang yang sangat kharismatik dan lihai dalam mengelola konflik politik. Para penulis dan sejarawan Arab menjulukinya sebagai *a man of hilm*, seorang yang memiliki kualitas kontrol diri yang menakjubkan. Mampu membuat keputusan yang tegas namun halus demi menjaga hegemoni atas lawan-lawan politiknya. Muawiyah, meskipun dengan segala kontroversinya, adalah sosok yang mampu menguasai tanpa harus membunuh. Keberhasilannya merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, dan meredakan tensi konflik dengan Abdullah bin Zubair dan para sahabat yang masih bertahan di Madinah, untuk kemudian memindahkan ibukota pemerintahan ke Damaskus sekaligus pada akhirnya berhasil mendeklarasikan anaknya sebagai pewaris kekuasaan



dalam sistem monarki absolut, adalah bukti kualitasnya sebagai seorang pemimpin yang tangguh. Maka dalam konteks tata kelola administrasi dalam sejarah Islam dapat diambil sebuah hikmah bahwa kualitas pemimpin adalah salah satu faktor penentu bagi integrasi sebuah negara yang besar agar dapat bertahan

D. Conclusion

Pada fase awal kekuasaan Dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan reformasi administrasi dengan membuat beberapa struktur birokrasi baru untuk mengelola urusan-urusan pemerintahan yang semakin kompleks. Berbeda dengan pengelolaan administrasi di masa para khalifah sebelumnya (*Khulafa ar-Rasyidin*) yang cenderung menempatkan khalifah sebagai tokoh sentral dalam pemerintahan yang memerankan beberapa fungsi sekaligus, Muawiyah justru membuat sistem birokrasi yang ramping dan efektif dengan menempatkan kolega dan kerabatnya pada posisi-posisi tertentu. Sistem ini dapat membuat para khalifah Dinasti Umayyah lebih leluasa untuk bersantai didalam istana dan berkonsentrasi untuk mengelola urusan politik.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga dikelola sedemikian rupa dengan memberi ruang otonom kepada Gubernur untuk mengelola wilayah administratifnya. Kecenderungan untuk memberikan otonomi kepada Provinsi terutama tampak di fase awal kekuasaan Dinasti Umayyah. Dari masa Muawiyah bin Abi Sufyan hingga Marwan bin Hakam. Otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah tampak mengalami pasang surut ketika dalam beberapa kesempatan dan di beberapa wilayah seperti di Irak dan Hijaz strategi tersebut justru membuat pemerintah pusat kesulitan mengendalikan loyalitas dan memicu perlawanan kepada rezim Dinasti Umayyah. Kegagalan dalam mengelola hubungan dengan



daerah serta adanya krisis kepemimpinan pada akhirnya ditengarai sebagai penyebab berakhirnya kekuasaan Dinasti Umayyah, dan menandai berdirinya Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Bagdad.

E. References

- Buray, J. (2018). *History of the Later Roman Empire: From the Death of Theodosius I to the Death of Justinian I*. New York: Dover Publications, Inc.
- Denis A. Rondinelli, John R. Nellis, G. Shabbir Cheema. (1983). *Decentralization in Developing Countries*. Washington DC: The World Bank.
- Duri, A. a.-A. (2014). *Early Islamic Institutions: Administration and Taxation from the Caliphate to the Umayyads and Abbasids*. London: I.B. Tauris.
- Hassan, D. S. (2003). *The Caliphate: Umayyads and Abbasids*. New Delhi: Jamia Milia Islamia.
- Ismail R al-Faruqi, Lois al-Faruqi. (1986). *The Cultural Atlas of Islam*. New York: Macmillan Publishing Company.
- K.Hitti, P. (2002). *History of The Arabs*. New York: Palgrave Macmillan.
- Katsir, I. (2004). *al Bidayah wa an Nihayah*. Baerut: Maktabah al-'Asriyah.
- Lapidus, I. M. (2004). *A History of Islamic Societies*, Cambridge University Press, (New York, 2004). New York: Cambridge University Press.
- Litvack, J. J. (1998). *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. Washington DC: World Bank.
- Nicolle, D. (2009). *The Great Islamic Conquests AD 632-750*. London: Osprey Publishing.
- Shalabi, M. A. (2013). *Episode Krusial Sejarah Islam: Muawiyah Bin Abu Sufyan*. Dar al Haq.



- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: Routledge.
- Tiller, M. (2020). *The Umayyads and The Formation of Islamic Judgeships*. London: Routledge.



TANTANGAN DAN UPAYA PENINGKATAN KINERJA APARATUR DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK: STUDI KUALITATIF DI DESA SALUT

M. Adib Zata Ilmam
Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
inizata@gmail.com

Lalu Moh. Nazar Fajri
Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
nazarfajri8@gmail.com

Nurul Jannah
Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
nuruljnh47@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan objek wisata Telaga Biru di Desa Perian sebagai bentuk pariwisata berbasis komunitas yang tumbuh dari inisiatif lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, studi ini menemukan bahwa pengelolaan Telaga Biru dilakukan secara swadaya oleh pemuda desa tanpa dukungan kelembagaan formal pada tahap awal. Kegiatan wisata telah menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial berbasis gotong royong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata berjalan secara substantif, bukan sekadar simbolik, dan memperlihatkan adanya model ko-kelola konservasi antara komunitas dan pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Namun demikian, pengembangan wisata ini juga menghadapi tantangan serius, seperti ketiadaan struktur kelembagaan legal, rendahnya kapasitas manajerial, dan keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pembiayaan. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor dibutuhkan agar potensi ekonomi, sosial, dan ekologis yang dimiliki Telaga Biru dapat dikelola secara berkelanjutan.

Keywords: *Pariwisata berbasis komunitas, Telaga Biru, pemberdayaan masyarakat, konservasi, pengelolaan kolaboratif, ekonomi lokal, TNGR.*



A. Pendahuluan

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Peranannya bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan sektor-sektor lain seperti transportasi, perdagangan, kuliner, kerajinan, dan jasa lainnya. Secara lebih spesifik, pariwisata memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, serta pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Oleh karena itu, arah pembangunan pariwisata nasional dewasa ini tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan konservasi sumber daya alam¹.

Dalam konteks global, pariwisata yang berkelanjutan semakin mendapat perhatian. Salah satu bentuknya adalah ekowisata, yang diartikan sebagai bentuk kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, serta menciptakan pengalaman wisata yang mendidik dan bermakna bagi pengunjung. Ekowisata berupaya memadukan kepentingan konservasi dengan pembangunan ekonomi secara harmonis, sehingga dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada tujuan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan ke-15 (melestarikan ekosistem daratan)².

Di Indonesia, potensi ekowisata sangat besar, mengingat kekayaan alam dan keragaman budaya yang dimiliki oleh tiap daerah. Salah satu pendekatan yang kian dikembangkan dalam pengelolaan

¹ United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

² Kiwang, A. S. & Arif, F. M. (2020). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Labuan Bajo Akibat Pembangunan Pariwisata. Gulawentah: Jurnal Studi Sosial. <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/gulawentah/article/view/7290>



ekowisata adalah pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism), yakni bentuk pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam seluruh aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan wisata. Model ini diyakini lebih mampu menciptakan pemerataan manfaat ekonomi, meningkatkan kapasitas sosial, serta memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya lokal mereka.

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat membawa dampak positif bagi kesejahteraan lokal. Kiwang dan Arif (2020) dalam penelitiannya di Labuan Bajo menunjukkan bahwa keberadaan pariwisata telah menciptakan alternatif pekerjaan baru, memperkuat jaringan sosial masyarakat, dan meningkatkan pendapatan keluarga melalui sektor informal seperti jasa parkir, makanan ringan, dan homestay³. Leha et al. (2020) menambahkan bahwa keberhasilan pengelolaan wisata tidak terlepas dari kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan limbah, sebagai salah satu indikator keberlanjutan destinasi⁴. Sementara itu, studi oleh Ismowati et al. (2024) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis wisata nasional sangat menentukan seberapa besar dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lokal, terutama dalam konteks penguatan UMKM dan koperasi desa⁵.

Namun demikian, tidak sedikit pula studi yang menggarisbawahi risiko yang dapat muncul apabila pengelolaan pariwisata tidak memperhatikan prinsip keadilan sosial dan

³ Leha, S. et al. (2020). Pengelolaan Sampah untuk Mendukung Keberlanjutan Pariwisata di Labuan Bajo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup*. https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Kesehatan_Masyarakat/article/view/995

⁴ Ismowati, R. et al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam KSPN Labuan Bajo. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik*. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/2369>

⁵ Wiratmi, D. (2018). *Ekonomi Politik Ekowisata Labuan Bajo*. Tesis S2, UGM. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/163725>

perlindungan terhadap masyarakat adat atau lokal. Dwi Wiratmi (2018), dalam kajian ekonomi politik ekowisata di Labuan Bajo, menyoroti adanya ketimpangan kontrol atas sumber daya antara investor luar dan masyarakat lokal, yang berdampak pada terpinggirkannya pelaku usaha mikro dan hilangnya akses masyarakat terhadap lahan produktif yang beralih fungsi menjadi fasilitas pariwisata⁶. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak cukup hanya sebatas partisipasi simbolik, melainkan harus terwujud dalam bentuk keterlibatan nyata yang dijamin oleh regulasi dan kelembagaan yang kuat.

Dalam konteks lokal, Desa Perian di Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, merupakan salah satu wilayah dengan potensi ekowisata yang belum sepenuhnya tergarap. Terletak di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Rinjani, desa ini memiliki bentang alam hutan yang masih alami serta sumber air jernih yang membentuk sebuah telaga berwarna kebiruan, yang dikenal dengan nama Telaga Biru. Sejak mulai dikembangkan sebagai objek wisata pada tahun 2020 oleh kelompok pemuda desa setempat, Telaga Biru menarik perhatian pengunjung karena keindahan alamnya yang masih asri dan relatif tersembunyi. Aktivitas wisata yang ditawarkan meliputi trekking ringan, camping, wisata air, hingga fotografi alam.

Pengelolaan destinasi ini dilakukan secara kolektif oleh kelompok Pemuda Telaga Biru, dengan dukungan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Bentuk kolaborasi ini menjadi contoh penerapan model co-management dalam pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menjaga kelestarian kawasan, mengatur distribusi pengunjung, dan menciptakan produk wisata berbasis kearifan lokal. Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, kegiatan ekonomi masyarakat

seperti penyewaan tenda, warung makan, jasa transportasi lokal, dan souvenir mulai berkembang.

Menurut data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, kunjungan wisatawan mengalami peningkatan sebesar 15% dalam tiga tahun terakhir, dengan total wisatawan domestik mencapai 638.361 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 45.222 orang⁷. Tren ini menunjukkan adanya potensi besar bagi pengembangan wisata lokal jika dikelola secara sistematis dan partisipatif. Akan tetapi, sejauh mana pengembangan pariwisata ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Perian masih perlu dikaji secara empiris.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan pariwisata Telaga Biru dan mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian mengenai ekowisata berbasis komunitas, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pengelolaan destinasi serupa di wilayah lain.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pengembangan pariwisata di Telaga Biru serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam berdasarkan pandangan para pelaku atau subjek yang terlibat secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mencari generalisasi, melainkan berupaya

⁷ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. (2023). Laporan Tahunan Kunjungan Wisata.



memahami makna yang tersembunyi di balik tindakan, kebijakan, dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan⁸.

Secara geografis dan administratif, Desa Perian merupakan salah satu desa yang terletak di sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Wilayah ini dipilih secara purposive (bertujuan) karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian, yakni keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata berbasis alam yang berkembang secara swadaya. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa pengembangan Telaga Biru masih relatif baru, sehingga prosesnya masih berlangsung dan dapat diamati secara langsung, baik dari sisi kelembagaan, partisipasi, maupun dinamika ekonominya.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

1. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas wisata, interaksi sosial antara pengunjung dan masyarakat, bentuk pelayanan wisata, dan kondisi fisik lingkungan Telaga Biru. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran riil dan tak terucapkan yang tidak selalu muncul dalam wawancara.
2. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi yang luas namun tetap terfokus. Pertanyaan dikembangkan secara fleksibel mengikuti alur percakapan, dengan tetap berpegang pada topik utama yaitu proses pengelolaan, tantangan, dan persepsi masyarakat terhadap manfaat ekonomi dari pariwisata.
3. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen dan catatan yang relevan, seperti data kunjungan wisatawan, laporan kegiatan kelompok pemuda pengelola, berita dari media lokal,

⁸ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.



serta kebijakan atau program dari pihak TNGR maupun pemerintah desa.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria:

- a) memiliki peran langsung dalam pengembangan Telaga Biru,
- b) mewakili kelompok masyarakat penerima dampak ekonomi, dan
- c) memahami kebijakan atau aspek kelembagaan pengelolaan wisata di kawasan hutan.

Sebanyak empat orang informan utama diwawancarai secara mendalam, yang terdiri atas: dua orang dari kelompok Pemuda Telaga Biru, satu orang warga lokal yang membuka usaha di sekitar objek wisata, dan satu orang staf dari Resort Joben, SPTN Wilayah II TNGR. Jumlah informan ini dianggap cukup karena data yang diperoleh telah menunjukkan pola informasi yang berulang (saturation) dan saling menguatkan satu sama lain.

Analisis data dilakukan secara simultan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama:

1. Reduksi data – proses memilah, menyederhanakan, dan merangkum informasi mentah menjadi kategori-kategori utama seperti bentuk pengelolaan, partisipasi masyarakat, dampak ekonomi, dan tantangan.
2. Penyajian data – data disusun dalam bentuk naratif deskriptif untuk mempermudah penarikan pola, hubungan antar kategori, dan penggambaran konteks secara utuh.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi – simpulan awal diuji melalui perbandingan data antar informan, pengamatan langsung, dan hasil dokumentasi, guna memastikan konsistensi dan validitas interpretasi⁹.

⁹ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.



Untuk menjaga keabsahan data (data trustworthiness), digunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber (informan, observasi, dan dokumen), serta metode yang berbeda (wawancara dan observasi). Selain itu, dilakukan pencatatan rinci dalam bentuk catatan lapangan (field notes), dokumentasi foto, dan pengkodean tematik selama proses analisis.

Waktu penelitian dilakukan dalam rentang bulan Mei–Juli 2025, dengan beberapa kali kunjungan lapangan untuk observasi dan wawancara. Proses ini memungkinkan peneliti tidak hanya mengumpulkan data statis, tetapi juga memahami perubahan-perubahan yang terjadi seiring waktu, seperti peningkatan aktivitas ekonomi, perubahan sikap masyarakat, dan respons terhadap kebijakan dari pihak pengelola kawasan.

Dengan pendekatan dan teknik ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai praktik pengembangan pariwisata berbasis komunitas serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

C. Hasil dan Diskusi

1. Inisiatif Komunitas: Penggerak Awal Pengembangan Telaga Biru

Pengembangan objek wisata Telaga Biru di Desa Perian berakar dari kesadaran ekologis dan semangat pemberdayaan sosial sekelompok pemuda lokal. Mereka menyadari bahwa keberadaan danau kecil alami di wilayah hutan sekitar desa merupakan potensi wisata yang belum tersentuh, padahal lokasinya hanya berjarak sekitar 20 menit dari permukiman warga. Pada tahun 2020, di tengah situasi pandemi yang mempersempit peluang kerja dan mobilitas ekonomi, para pemuda ini mulai membersihkan area sekitar telaga, membuka jalan setapak dari permukiman, dan mempromosikan tempat tersebut melalui media sosial.



Model pengembangan yang mereka terapkan sepenuhnya bersifat swadaya dan partisipatif, tanpa dukungan dana awal dari pemerintah atau lembaga luar. Akses jalan, spot foto, hingga fasilitas sederhana untuk berkemah dibuat dari bahan-bahan lokal yang mudah didapat. Bahkan promosi awal dilakukan secara sukarela melalui akun media sosial pribadi. Tindakan ini menunjukkan bentuk modal sosial yang kuat dalam masyarakat Desa Perian, di mana relasi informal seperti kepercayaan, solidaritas, dan rasa memiliki menjadi pengganti dari instrumen kelembagaan formal yang belum terbentuk. Hal ini sesuai dengan teori social capital yang dikemukakan oleh Bourdieu dan Putnam, di mana kepercayaan dan jaringan sosial menjadi fondasi dari tindakan kolektif yang produktif¹⁰.

Pemuda desa menjadi aktor utama yang mendobrak keterbatasan struktural. Mereka tidak hanya menjadi pekerja teknis di lapangan, tetapi juga berfungsi sebagai perencana, operator, sekaligus komunikator yang menjembatani masyarakat, pengunjung, dan pemangku kebijakan dari pihak TNGR. Dalam banyak kasus, peran generasi muda dalam pembangunan desa seringkali dipandang sebelah mata. Namun dalam konteks ini, mereka justru menjadi pengungkit yang mengubah relasi antara sumber daya lokal dan peluang ekonomi wisata.

2. Pengelola Konservasi: Hubungan Komunitas dan TNGR

Salah satu kekhasan dari pengelolaan Telaga Biru adalah keberadaannya di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Ini berarti bahwa segala bentuk aktivitas manusia di kawasan tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip konservasi. Dalam banyak kasus, hal ini menjadi hambatan bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan ekonomi karena adanya batasan hukum dan administratif. Namun dalam kasus Telaga Biru, yang

¹⁰ Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.

terjadi justru bentuk kerja sama antara komunitas lokal dan lembaga konservasi negara, atau yang dalam literatur dikenal dengan istilah co-management atau pengelolaan bersama sumber daya alam¹¹.

Pihak Resort Joben, sebagai perpanjangan tangan Balai TNGR di tingkat tapak, secara terbuka merespons inisiatif masyarakat dengan pendekatan pendampingan. Izin aktivitas wisata diberikan secara informal, dengan catatan bahwa masyarakat tidak boleh melakukan pembangunan permanen dan harus menjaga kelestarian vegetasi sekitar telaga. Dalam beberapa pertemuan, pihak TNGR memberikan edukasi lingkungan, mendampingi kegiatan bersih-bersih kawasan, serta memberikan saran teknis dalam pengelolaan sampah dan pengaturan alur kunjungan.

Hubungan ini tidak lepas dari dinamika di satu sisi masyarakat ingin mengembangkan lebih lanjut, misalnya dengan membangun toilet atau gazebo permanen, namun di sisi lain TNGR menekankan prinsip konservasi. Ketegangan ini menciptakan ruang dialog yang produktif, di mana kedua pihak saling belajar mengenai keterbatasan dan potensi masing-masing. Ini menjadi bentuk praksis dari teori commons governance yang menekankan pentingnya mekanisme kolaboratif dalam mengelola sumber daya bersama¹².

3. Transformasi Ekonomi: Dampak terhadap Mata Pencaharian Lokal

Sebelum pengembangan Telaga Biru, mayoritas masyarakat Desa Perian menggantungkan hidup dari pertanian subsisten dan kerja serabutan musiman. Mata pencaharian tersebut tidak stabil, bergantung pada musim dan harga pasar yang tidak pasti. Sejak

¹¹ Berkes, F. (2009). Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. *Journal of Environmental Management*, 90(5).

¹² Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.



Telaga Biru dikenal publik, terjadi pergeseran dalam struktur penghidupan masyarakat, terutama pada dua lapis utama:

Pertama, terbentuknya sumber pendapatan baru, seperti penjualan makanan/minuman di warung sekitar, jasa parkir kendaraan, jasa penyewaan tenda dan tikar, serta penyediaan kebutuhan logistik kegiatan berkemah.

Kedua, terbukanya peluang kerja informal, terutama bagi remaja dan ibu rumah tangga, untuk berkontribusi dalam layanan wisata meski tanpa latar belakang kepariwisataan.

Dari hasil wawancara mendalam dengan pengelola dan warga lokal, ditemukan bahwa dalam musim liburan atau akhir pekan panjang, penghasilan dari usaha kecil ini bisa mencapai dua sampai tiga kali lipat dari penghasilan bertani biasa. Seorang warga mengatakan:

“Kalau ada rombongan camping, kami bisa jual jagung, kopi, madu hutan, bahkan kalau perlu bantu masak. Sebelum ada Telaga Biru, kami jarang bisa jual ke orang luar.”

Ini menegaskan konsep multiplier effect dari pariwisata, di mana kehadiran pengunjung memicu rantai aktivitas ekonomi lokal secara horizontal. Sejalan dengan penelitian Suansri (2003) dan Yuliasuti (2017), pengembangan wisata berbasis komunitas mampu menciptakan sirkulasi ekonomi lokal yang kuat jika dimanajementi secara partisipatif dan inklusif¹³.

Namun, belum adanya sistem pencatatan keuangan yang rapi, minimnya akses terhadap pelatihan kewirausahaan, serta absennya kelembagaan formal seperti koperasi atau BUMDes, membuat pertumbuhan ekonomi ini belum optimal. Risiko kecurangan,

¹³ Suansri, P. (2003). *Community-Based Tourism Handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour - REST; Yuliasuti, N. (2017). Dampak Ekonomi Pengembangan Pariwisata Alam. *Jurnal Kawistara*, 7(3).



konflik internal, dan stagnasi inovasi tetap terbuka jika tidak segera ditangani.

4. Ketimpangan Kapasitas dan Tantangan Kelembagaan

Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam mobilisasi sosial dan ekonomi, pengelolaan Telaga Biru masih menghadapi tantangan serius dalam hal kapasitas kelembagaan. Kelompok pengelola belum memiliki struktur organisasi yang baku, belum berbadan hukum, dan belum memiliki perangkat administratif seperti buku kas, perjanjian kerja sama, atau SOP pelayanan wisata. Seluruh keputusan dilakukan secara musyawarah, dan tidak ada notulensi formal.

Dalam jangka pendek, model informal ini memberi fleksibilitas tinggi. Namun dalam jangka panjang, hal ini berisiko menimbulkan konflik internal, ketidakjelasan hak dan kewajiban, serta kesulitan dalam menjalin kemitraan dengan pihak luar. Dalam studi Scheyvens (1999), dijelaskan bahwa keberhasilan pariwisata komunitas bukan hanya ditentukan oleh potensi alam dan partisipasi, tetapi juga oleh kekuatan kelembagaan lokal¹⁴.

Sebagai contoh, ketika pihak TNGR atau pemerintah kabupaten ingin memberikan bantuan berbentuk alat atau pelatihan, sering terkendala karena tidak ada rekening resmi atau legalitas organisasi. Hal ini menjadi pembelajaran penting bahwa pembangunan kelembagaan adalah komponen krusial yang tidak boleh diabaikan dalam wisata berbasis komunitas.

D. Kesimpulan

¹⁴ Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249.



Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan objek wisata Telaga Biru di Desa Perian merupakan praktik nyata dari pariwisata berbasis komunitas yang tumbuh dari inisiatif lokal, diperkaya oleh partisipasi generasi muda, dan diperkuat oleh pola kerja sama dengan lembaga konservasi negara (TNGR). Inisiatif ini berhasil menggerakkan potensi sosial dan ekonomi masyarakat secara mandiri, meskipun dilakukan dalam kondisi sumber daya yang terbatas dan tanpa dukungan kelembagaan formal pada tahap awal.

Keberhasilan awal tersebut ditandai oleh beberapa aspek penting. Pertama, adanya mobilisasi modal sosial yang tinggi di antara warga desa, khususnya pemuda, yang menjadi motor penggerak perubahan. Kedua, munculnya sumber pendapatan alternatif melalui aktivitas wisata yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi lokal, terutama pada sektor informal seperti jasa parkir, warung, dan penyewaan alat berkemah. Ketiga, keberadaan TNGR sebagai pengelola kawasan konservasi telah direspons secara adaptif oleh masyarakat melalui mekanisme ko-kelola, membentuk sinergi antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkap sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani agar keberhasilan awal ini dapat berlanjut secara berkelanjutan. Tantangan tersebut antara lain: belum adanya struktur kelembagaan formal, keterbatasan kapasitas manajerial dan administrasi, serta ketergantungan pada pengunjung musiman tanpa strategi diversifikasi usaha yang matang. Jika tidak ditangani, kondisi ini berisiko menimbulkan stagnasi atau bahkan konflik dalam komunitas pengelola.

Untuk itu, diperlukan intervensi yang bersifat fasilitatif dari pemerintah desa, lembaga konservasi, maupun aktor non-pemerintah yang berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan kewirausahaan, dan perluasan jejaring kemitraan. Ke depan, model pengelolaan wisata seperti di Telaga Biru dapat dijadikan referensi strategis bagi desa-desa lain di



kawasan penyangga taman nasional untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal secara inklusif dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan nilai-nilai ekologis dan sosial budaya yang telah ada.

Daftar Pustaka

- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: The role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4), 629–649. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2)
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Berkes, F. (2009). Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1692–1702. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.12.001>
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets. ACTA Publications.
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in Practice*, 13(5), 474–486. <https://doi.org/10.1080/0961452032000125857>
- Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00069-7](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7)



Suansri, P. (2003). *Community-based tourism handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour (REST).

Yuliasuti, N. (2017). Dampak ekonomi pengembangan pariwisata alam di desa wisata berbasis komunitas. *Jurnal Kawistara*, 7(3), 227–240. <https://doi.org/10.22146/kawistara.26510>

